



**PENGARUH CHINA TERHADAP KAMBOJA DALAM KONFLIK LAUT
CHINA SELATAN**
*CHINA'S INFLUENCE ON CAMBODIA IN THE DISPUTED SOUTH
CHINA SEA*

SKRIPSI

Oleh

AAD RIFQY
NIM 120910101055

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PENGARUH CHINA TERHADAP KAMBOJA DALAM KONFLIK LAUT
CHINA SELATAN
*CHINA'S INFLUENCE ON CAMBODIA IN THE DISPUTED SOUTH
CHINA SEA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh
AAD RIFQY
NIM 120910101055

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala atas rahmat serta berkat ridho yang tiada berkesudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Alm Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Asifatul Muawanah
2. Saudara saya Rega Barlaman dan Age Juhdi Alfani
3. Para sahabat
4. Dosen serta staff Perguruan Tinggi
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember

MOTTO

“Iqra..”¹

(Bacalah)



¹ QS: AL – ALAQ: 1

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aad Rifqy

NIM : 120910101055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENGARUH CHINA TERHADAP KAMBOJA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2019
Yang menyatakan,

Aad Rifqy
NIM 120910101055

SKRIPSI

**PENGARUH CHINA TERHADAP KAMBOJA DALAM KONFLIK LAUT
CHINA SELATAN
*CHINA'S INFLUENCE ON CAMBODIA IN THE DISPUTED SOUTH
CHINA SEA***

Oleh

AAD RIFQY

120910101055

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh China Terhadap Kamboja Dalam Konflik Laut China Selatan” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Januari 2019
Waktu : 09.00
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Agus Trihartono, S.Sos, MA, Ph.D
NIP 196908151995121001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. Ph.D
NIP 196108281992011001

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si
NIP 196105151988021001

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si
NIP 197212041999031004

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M. Si
195808101987021002

RINGKASAN

Pengaruh China Terhadap Kamboja Dalam Konflik Laut China Selatan:
Aad Rifqy, 120910101055 : 2018: 81 Halaman: Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan telah terjadi sejak berabad-abad, namun ketegangannya memuncak pada tahun 2012. Ketegangan konflik tersebut memicu kekhawatiran menjadi kawasan sengketa yang berdampak global. Sengketa ini terkait kedaulatan atas wilayah pulau Paracel dan Spratly. Negara - negara yang terlibat dalam sengketa ini antara lain : China, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Sebagai Negara anggota ASEAN, Kamboja tidak sepakat dan menolak untuk bersikap terkait aksi China di Laut China Selatan, dan berpendapat bahwa masalah wilayah itu selayaknya ditangani diantara pihak bersengketa dan tidak melibatkan kelompok kawasan ASEAN, kebuntuan politik pun terjadi. Persatuan ASEAN menjadi rusak akibat Kamboja yang menjadi tuan ketua dalam pertemuan. Hal itu membuat KTT ASEAN di Kamboja yang telah diselenggarakan pada tahun 2012 belum menghasilkan solusi apapun terkait sengketa Laut China Selatan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari data-data sekunder yang sesuai untuk menjelaskan permasalahan. Pengumpulan data yang digunakan lebih difokuskan pada informasi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar cetak maupun elektronik, dan data berupa artikel yang bersumber dari internet yang terkait dengan topik permasalahan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah konsep kepentingan nasional dan konsep *regional power strategy* yang dianggap sesuai dan relevan untuk menjelaskan bagaimana China dapat mempengaruhi Kamboja di dalam ASEAN untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di Laut China Selatan.

China mempengaruhi Kamboja dalam konflik Laut China Selatan dengan menawarkan beberapa keuntungan kepada pemerintahan Kamboja seperti memberikan manfaat ekonomi dan militer yang luas tanpa menuntut bentuk-

bentuk imbalan politik yang mahal sebagai gantinya, dengan demikian Kamboja terikat pada kebijakan China. Strategi itu dilakukan China untuk mewujudkan kepentingan ekonomi dalam mendapatkan potensi yang ada di kawasan Laut China Selatan untuk peningkatan ekonomi China dan kepentingan pertahanan dalam mendominasi kekuatannya di wilayah Sengketa Laut China Selatan sebagai kekuatan maritim. Karena keterbatasan yang dimiliki Kamboja membuat China akan lebih mudah dalam mempengaruhi kebijakan Kamboja diantara negara-negara anggota ASEAN yang lain.



PRAKATA

Puji syukur atas rahmat Allah SWT serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh China Terhadap Kamboja Dalam Konflik Laut China Selatan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sepenuhnya usaha sendiri. Penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga atas segala bentuk bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan bapak Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Dimana keduanya telah meluangkan waktu di antara serangkaian kesibukan, untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini,
3. Bapak dan Ibu dosen serta staf jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa,
4. Kedua orang tua saya, Alm bapak Miftahul Ulum dan ibu Asifatul Muawanah dan Rega baraman adik kandung saya yang selalu memberikan dukungan berupa; doa dan nasehat, serta semangat bagi penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Saudara sepupu saya Age Juhdi Alfani yang selalu mengarahkan layaknya pembimbing

6. Saudara dan Sahabat saya: Ntung, Riski, Eka, Towi, Anggra, Nindi, Bayu, Itok Able.
7. Untuk Avianti Shirly yang telah menemani dan menyemangati sampai saat ini
8. Para rekan seperjuangan, Mahasiswa Hubungan Internasional terutama angkatan 2012
9. Punggawa Kantin dan Myway: Fu, Mas Radik, Mas Pandu, Bahrul, Viki, Putri, Zeni, Kiki, Mas Egar, Adhit, Dkk.
10. Senior yang senantiasa menemani dan mengarahkan: Mas Joko, Mas Rozi, Mas wawan, Mas Mukhlis dan semua yang ada di dalam grub “Tempat Curhat”.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 31 Januari 2019

Penulis

DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar Kelompok gugus kepulauan di Laut China Selatan.....	19
2.2	Gambar Total Produksi ikan negara wilayah Laut China Selatan	21
2.3	Gambar Cadangan minyak dan gas alam di Laut China Selatan	22
2.4	Gambar Dua jalur utama di Laut China Selatan yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah ke Asia	23
2.5	Gambar Tuntutan China dengan 9 garis putus-putus (<i>Nine dash line</i>).....	29
2.6	Gambar Lokasi Pulau-pulau yang telah diduduki oleh negara-negara bersengketa	30
3.1	Gambar Peta Kamboja.....	36
3.1	Tabel Hasil Komoditi Pangan tahun 1994-1995 (dalam satuan Ha).....	41
4.1	Grafik Produk Domestik Bruto Kamboja tahun 2006 – 2016.....	42
4.2	Grafik Pendapatan per kapita Kamboja tahun 2006 – 2016.....	42
3.4	Gambar Peningkatan Inflasi Kamboja tahun 2007-2009	43
3.2	Tabel Data Investor tertinggi di Kamboja (dalam juta USD).....	46
3.3	Tabel Mitra ekspor-impor Kamboja tahun 2007-2010 (dalam juta USD)	47
4.1	Gambar Pembangunan pangkalan militer China tahun 2015	54
4.2	Gambar Pangkalan militer China di kepulauan Spratly	54
4.1	Tabel Ketentuan Pinjaman dari China Dibandingkan dengan Bantuan Lain (untuk Sebagian Besar Proyek).....	60

DAFTAR SINGKATAN

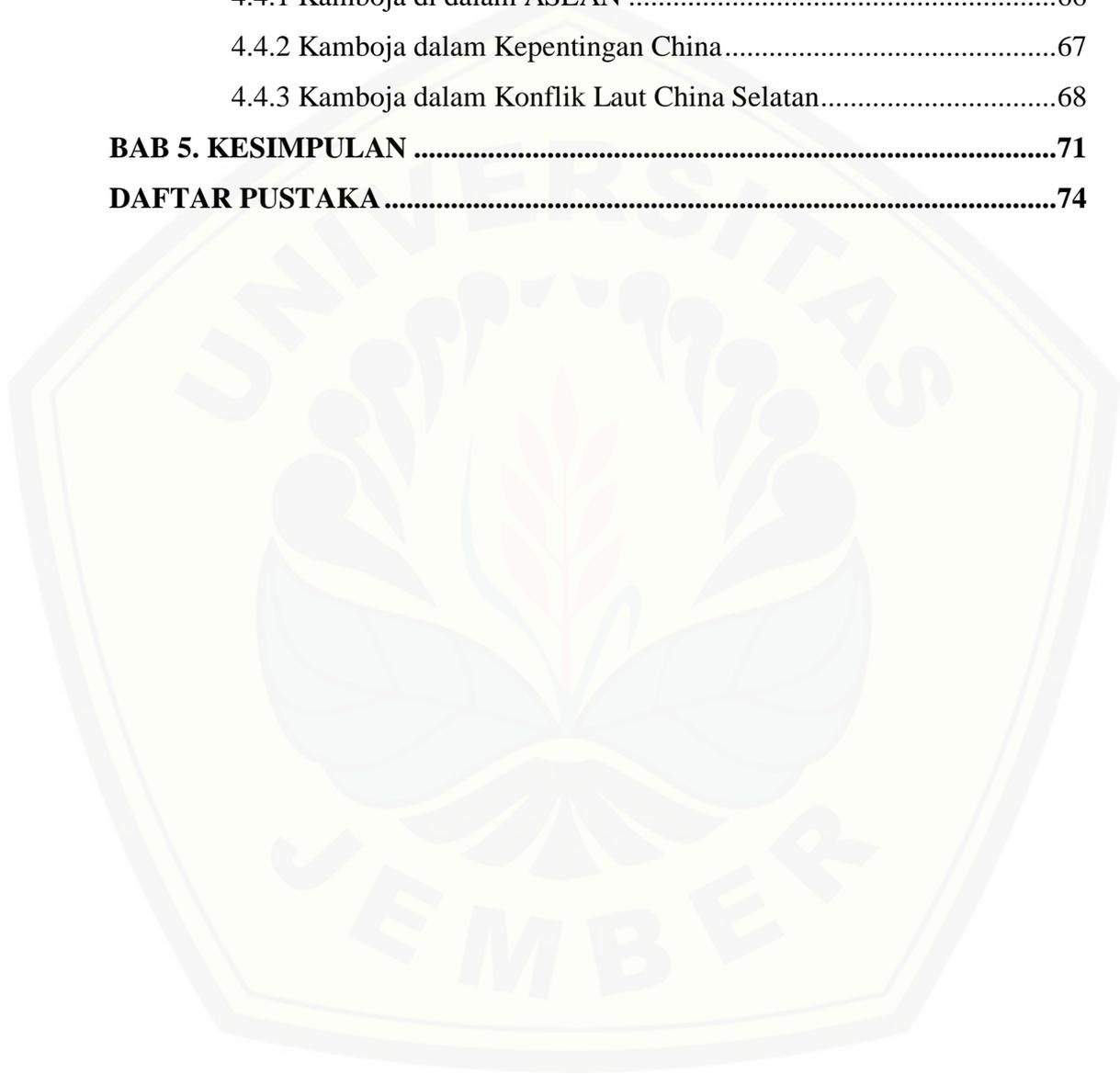
<i>ADB</i>	<i>Asian Development Bank</i>
<i>AIIB</i>	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
<i>ARF</i>	<i>ASEAN Regional Forum</i>
<i>AS</i>	<i>Amerika Serikat</i>
<i>ASEAN</i>	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
<i>CoC</i>	<i>Code of Conduct</i>
<i>CPP</i>	<i>Cambodia People's Party</i>
<i>DoC</i>	<i>Declaration on Conduct</i>
<i>EIA</i>	<i>Energy Information Administration</i>
<i>GDP</i>	<i>Gross Domestic Brutto</i>
<i>GNP</i>	<i>Gross National Product</i>
<i>KTT</i>	<i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
<i>PBB</i>	<i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
<i>PDB</i>	<i>Produk Domestik Bruto</i>
<i>TAC</i>	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>
<i>UNCLOS</i>	<i>United Nation Convention on the Law of the Sea</i>
<i>USD</i>	<i>US Dolar</i>
<i>ZOPFAN</i>	<i>Zone of Peace Freedom and Neutrality</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR BIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi.....	7
1.2.2 Batasan Waktu.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual.....	7
1.5.1 Kepentingan Nasional.....	8
1.5.2 <i>Regional Power Strategy</i>	10
1.6 Argumen Utama	15
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	16
1.7.2 Teknik Analisis Data	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB 2. KONFLIK DAN DINAMIKA LAUT CHINA SELATAN	18
2.1 Letak Strategis Laut China Selatan.....	18
2.2 Potensi di Laut China Selatan	20
2.2.1 Potensi Sumber Daya Alam.....	21

2.2.2 Potensi Strategis Ekonomi.....	23
2.2.2 Potensi Militer	24
2.3 Tumpang Tindih Klaim Laut China Selatan	25
2.3.1 Klaim Vietnam di Laut China Selatan.....	25
2.3.2 Klaim Filipina di Laut China Selatan	27
2.3.3 Klaim Malaysia di Laut China Selatan.....	28
2.3.4 Klaim Brunei Darussalam di Laut China Selatan.....	28
2.3.5 Klaim China di Laut China Selatan.....	28
2.4 Peran ASEAN dalam Konflik Laut China Selatan	31
2.4.1 Pertemuan Negara Anggota ASEAN	32
2.4.2 Penerapan Kode Etik Konflik Laut China Selatan	33
2.4.3 Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan melalui <i>ASEAN Regional Forum</i> (ARF)	34
BAB 3. HUBUNGAN BILATERAL CHINA DAN KAMBOJA	36
3.1 Gambaran Umum Negara Kamboja	36
2.3.1 Kondisi Politik.....	37
2.3.2 Kondisi Politik Luar Negeri Kamboja.....	39
2.3.3 Kondisi Ekonomi Kamboja	40
3.2 Hubungan Bilateral China - Kamboja	45
2.3.1 Hubungan Kerjasama di Bidang Ekonomi	45
2.3.2 Hubungan Kerjasama di Bidang Militer.....	48
BAB 4. KEMAMPUAN CHINA MEMPENGARUHI KAMBOJA SEBAGAI INSTRUMEN DI DALAM ASEAN DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN	51
4.1 Arti Penting Laut China Selatan bagi China	51
4.1.1 Kepentingan Ekonomi	51
4.1.2 Kepentingan Pertahanan	52
4.2 Konflik Laut China Selatan dan Peran ASEAN.....	55
4.2.1 Konflik Laut China Selatan	55
4.2.2 Peran ASEAN dalam Konflik Laut China Selatan.....	57
4.2 Hegemoni China terhadap Kamboja	59

4.4 Ketergantungan Kamboja terhadap China	64
4.4.1 Ketergantungan Ekonomi	64
4.4.2 Ketergantungan Keamanan.....	65
4.5 Peran Kamboja dalam Konflik Laut China Selatan.....	66
4.4.1 Kamboja di dalam ASEAN	66
4.4.2 Kamboja dalam Kepentingan China.....	67
4.4.3 Kamboja dalam Konflik Laut China Selatan.....	68
BAB 5. KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola hubungan internasional bergeser pada fase yang lebih damai, stabil dan kooperatif sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an. Pola politik dalam sistem internasional tidak lagi dipandang sebagai konflik persaingan kekuatan militer antar negara namun lebih ke arah peredaan. Peredaan konflik tersebut lebih fokus kepada kekuatan nasional komprehensif yang juga meliputi ekonomi dan teknologi. Peredaan konflik tersebut tercermin dalam konflik kawasan Laut China Selatan yang melibatkan China dengan beberapa negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Negara-negara yang terlibat dalam persoalan Laut China Selatan lebih mengedepankan dialog daripada konfrontasi langsung menggunakan kekuatan militer antar negara. Dalam konflik Laut China Selatan, upaya dialog telah dilakukan oleh ASEAN dan China dimulai sejak tahun 2002 (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013). Dialog antara ASEAN dan China dilakukan untuk membuat komitmen yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang berkonflik. Meskipun dalam perkembangan penyelesaian konflik Laut China Selatan mengalami kesulitan namun upaya dialog dalam beberapa kali pertemuan tersebut menunjukkan sebagai bentuk komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Konflik yang terjadi di laut China Selatan telah terjadi sejak berabad-abad, namun ketegangannya memuncak pada tahun 2012. Ketegangan konflik tersebut memicu kekhawatiran menjadi kawasan sengketa yang berdampak global. Sengketa ini terkait kedaulatan atas wilayah pulau Paracel dan Spratly. Negara - negara yang terlibat dalam sengketa ini antara lain : China, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.

China yang menjadi pihak bersengketa dengan 4 negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei) berupaya untuk mendapatkan dukungan di dalam ASEAN dengan mendekati Kamboja yang merupakan negara terakhir yang menjadi anggota dalam ASEAN pada April 1999 (Kingdom of Cambodia). Di Asia Tenggara, kekuatan militer Kamboja menduduki peringkat paling bawah sebelum Laos. Angka *index power* Kamboja masih terbilang 1,8404 diatas Laos yang memiliki *indeks power* sebesar 3,0608 (Global Fire Power, 2018). Semakin besar angka *indeks power* suatu negara menunjukkan bahwa kekuatan militer suatu negara semakin lemah. Sebaliknya, semakin kecil angka *indeks power* suatu negara menunjukkan kekuatan ketahanan militer yang semakin baik. Namun tidak mengurungkan niat China untuk memilih Kamboja dan mendapat dukungan Kamboja di dalam ASEAN.

Melihat letak Laut China Selatan sebagai kawasan perairan yang strategis dan kekayaan sumber daya alam mineral yang terkandung di dalamnya, menjadikan negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut saling berebut untuk menguasai secara legal. Menurut data dari *U.S. Energy Information Administration* (EIA) cadangan minyak di kawasan perairan tersebut sebesar 213 miliar barel atau 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat. Kawasan perairan Laut China Selatan juga merupakan jalur perdagangan energi dunia yang penting (U.S. Energy Information Administration, 2013). Selain itu, menurut menteri luar negeri China, Wang Yi, Laut China Selatan juga merupakan salah satu jalur pelayaran yang dianggap bebas dan aman di dunia (Saju, 2016). Wilayah Laut China Selatan mengandung kekayaan mineral yang jumlahnya cukup besar. Selain itu, wilayah tersebut juga merupakan jalur pelayaran yang strategis untuk lalulintas perdagangan dunia.

China mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan ini terbentang ratusan mil dari selatan timur di provinsi Hainan dan kawasan Paracel serta Spratly merupakan bagian dari bangsa China. Pada tahun 1947, China mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan negara itu. Peta itu menunjukkan dua rangkaian pulau yang masuk dalam wilayah mereka penting (U.S. Energy Information Administration, 2013). Peta yang dikeluarkan tahun

1947 dijadikan pedoman penguasaan kawasan Laut China Selatan terutama dua pulau besar Spratly dan Paracel oleh China.

Klaim kawasan oleh masing-masing negara muncul kembali menjadi isu hangat di tahun 1970-an. Negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan mulai memperkuat tuntutan atas klaim wilayah di kawasan Laut China Selatan. Situasi saling klaim tersebut menjadi tegang ketika China semakin tegas klaimnya di Laut China Selatan. Hal ini dibuktikan dengan semakin diperluasnya jangkauan militer China, guna melemahkan berbagai klaim yang telah diajukan oleh negara-negara yang bersengketa (Weissmann, 2014).

ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara telah berupaya meredam ketegangan konflik Laut China Selatan antara China dengan 4 negara anggota ASEAN yakni Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. ASEAN memiliki caranya sendiri dalam penyelesaian sengketa. ASEAN sudah berhasil menandatangani *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DoC) dengan Cina tahun 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan China untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut China Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. DoC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan China dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan perjanjian itu, negara-negara yang mengklaim sepakat "menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi dengan cara damai tanpa penggunaan kekerasan, dan melalui perundingan".

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 6 April 2012 ASEAN mengajukan kepada Cina dokumen yang mengandung unsur-unsur utama dokumen *Code of Conduct* (CoC) yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik (*operational preventive measure*) dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif (*effectively regulate the behaviour*) CoC itu (Kementerian

Luar Negeri Republik Indonesia, 2017). Namun Filipina menginginkan ASEAN agar satu suara terlebih dahulu sebelum China dilibatkan dalam merumuskan CoC untuk di negosiasikan.

Hal itu membuat KTT ASEAN di Kamboja yang telah diselenggarakan pada tahun 2012 belum menghasilkan solusi apapun terkait sengketa Laut China Selatan. Sebagai Negara anggota ASEAN, Kamboja tidak sepakat dan menolak untuk bersikap terkait aksi China di Laut China Selatan, dan berpendapat bahwa masalah wilayah itu selayaknya ditangani diantara pihak bersengketa dan tidak melibatkan kelompok kawasan ASEAN, kebuntuan politik pun terjadi. Persatuan ASEAN menjadi rusak akibat Kamboja yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu mendapatkan tekanan dari China (Mahbubani & Sng, 2017, hal. 142). Bahkan Kamboja menyatakan dukungannya kepada China dalam sengketa Laut China Selatan. Sekretaris Luar Negeri Kamboja, Soeung Rathchavy, berpendapat bahwa masalah “sengketa Laut China Selatan tidak diangkat sebagai isu kawasan ASEAN, tetapi cukup diselesaikan diantara negara anggota ASEAN yang bersengketa” (Ramadhan, 2015). Sehingga KTT ASEAN pada tahun 2012 di Kamboja tidak menghasilkan keputusan soal sengketa Laut China Selatan.

Dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan, Kamboja dikenal sebagai negara ASEAN yang menjadi sekutu China. Filipina menuduh Kamboja dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas menolak draft Kode Etik pernyataan bersama ASEAN mengenai konflik Laut China Selatan. Pada saat perhelatan Menteri Luar Negeri ASEAN tahun 2012 di Kamboja, Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Nam Hong menolak pembuatan Kode Etik bersama negara ASEAN. Kode Etik bersama dibuat sebagai bentuk solidaritas negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan wilayah maritim Laut China Selatan (Noroyono dan Hapsari, 2012).

Sikap Kamboja tersebut telah membuat ketegangan hubungan antara Kamboja dengan Filipina dan beberapa negara ASEAN lainnya. Ketegangan tersebut ditunjukkan dengan sikap pemerintah Kamboja yang menarik Duta besarnya Hos Sereythanh di Filipina. Hos Sereythanh menyatakan bahwa Filipina dan Vietnam bekerjasama dan membajak komunikasi bersama dalam pertemuan

ASEAN di Kamboja beberapa waktu lalu, dan menuduh Filipina memainkan politik kotor dalam perebutan wilayah dengan China terkait konflik Laut China Selatan (JPNN, 2012). Perbedaan pandangan dan sikap di antara 10 Negara anggota ASEAN semakin keruh karena komentar Sereythanh setelah ASEAN gagal mencapai kesepakatan menyikapi sengketa Laut China Selatan dalam pertemuan di Kamboja.

Proses pengelolaan sengketa yang melibatkan China dan 4 negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei) telah memasuki tahapan penting yaitu dengan adanya rencana membahas CoC yang nantinya akan disepakati oleh semua negara mengenai bagaimana perumusan CoC agar dapat dilakukan. Namun pada pertemuan menteri luar negeri negara ASEAN di Vientiane, Laos, pada July 2016 lalu gagal mencapai kesepakatan terkait dengan penyelesaian konflik Laut China Selatan karena Kamboja memecah suara di ASEAN, bahkan Laos yang menjadi tuan rumah juga dituduh memblokir pernyataan bersama (Media Indonesia, 2016).

Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menciptakan perdamaian negara bangsa tidak mampu menggunakan otoritasnya dalam penyelesaian konflik sengketa Laut China Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari lambannya pencapaian titik temu atau kesepakatan dalam pembahasan CoC antara ke empat negara anggota ASEAN dengan China. Pada tahun 2012 ketika diselenggarakannya pertemuan menteri-menteri luar negeri anggota ASEAN, organisasi regional kawasan Asia Tenggara tersebut belum mengeluarkan keputusan apa pun terkait konflik di kawasan Laut China Selatan.

Penolakan Kamboja atas pembuatan Kode Etik bersama negara ASEAN, membuat China lebih leluasa dalam mengeksplor wilayah klaimnya di Laut China Selatan. Oleh karena sikap Kamboja yang menguntungkan China, China memberikan pinjaman sebesar 195 juta US Dolar (USD) atau senilai Rp. 2,6 triliun kepada Kamboja. Pinjaman tersebut digunakan Kamboja untuk menambah perlengkapan militernya. Pinjaman uang dari China tersebut digunakan Kamboja untuk membeli sejumlah peralatan militer. Kamboja memborong 12 helikopter Harbin Z-9 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, China berderma lagi dengan

memberi 26 truk dan 30 ribu seragam militer (Apriliana, 2015). Kamboja menjadi satu-satunya negara yang dekat dengan China secara sosial, historis dan budaya.

Pada tahun 2017 perkembangan konflik Laut China Selatan telah mereda. ASEAN dan China telah menemukan kesepakatan untuk menangani konflik. Tanggal 27 Februari 2017 di Bali, ASEAN bersama China bersepakat untuk menyusun kerangka kode etik atau CoC untuk menangani konflik Laut China Selatan. Pertemuan negara anggota ASEAN dan China membuahkan hasil yang positif. Pertemuan tersebut telah meredakan kondisi konflik Laut China Selatan antara negara anggota ASEAN dengan China (Suastha, 2017).

Untuk mewujudkan kepentingannya di kawasan Laut China Selatan, China berupaya mempengaruhi Kamboja untuk mendapatkan dukungan di dalam ASEAN. China berupaya mendapatkan dukungan di dalam ASEAN dengan mendekati Kamboja yang merupakan negara terakhir yang menjadi anggota dalam ASEAN pada April 1999. Serta kekuatan militer Kamboja menduduki peringkat paling bawah sebelum Laos di Asia Tenggara. Namun tidak mengurungkan niat China untuk memilih Kamboja dan mendapat dukungan Kamboja di dalam ASEAN.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh China Terhadap Kamboja Dalam Konflik Laut China Selatan“

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Menulis karya ilmiah diperlukan proses yang jelas dan runtut, untuk memudahkan pembahasan dan menganalisa suatu permasalahan secara sistematis dan terarah. Oleh sebab itu, ruang lingkup pembahasan merupakan hal yang penting untuk menentukan batasan penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Sesuai dengan judul karya ilmiah ini, penulis memberi batasan pembahasan pada strategi China mempengaruhi Kamboja sebagai instrumen dalam konflik Laut China Selatan.

1.2.2 Batasan Waktu

Penulis menggunakan batasan waktu dalam karya ilmiah ini dengan maksud agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dan mempermudah untuk melakukan proses analisa. Penulis memberi batasan waktu karya ilmiah ini dimulai dari tahun 2012 dimana Kamboja menyatakan dukungannya kepada China dalam KTT ASEAN terkait pembahasan sengketa Laut China Selatan. Sampai pada tahun 2017 dimana ASEAN – China menyetujui pembahasan lebih lanjut CoC tentang penyelesaian konflik sengketa kawasan Laut China Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan mengarahkan penulisan karya ilmiah ini sehingga akan fokus pada analisa permasalahan yang dibahas. Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam karya ilmiah ini, yaitu **“Bagaimana China Mempengaruhi Kamboja dalam Konflik Laut China Selatan?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana China mempengaruhi Kamboja dalam konflik Laut China Selatan.

1.5 Kerangka Konseptual

Untuk memahami suatu fenomena, penulis perlu melakukan penyederhanaan dan konseptualisasi. Suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek atau suatu fenomena tertentu. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional.

1.5.1 Kepentingan Nasional

Menurut Donald E Nuechterlin menyebutkan dimensi kepentingan nasional menjadi 4 jenis yaitu (Nuechterlein, 1976):

1. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.

Pada poin kepentingan ekonomi menjadi relevan dalam menjelaskan sikap China memilih Kamboja dalam konflik Laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran lalu lintas kapal-kapal niaga dan tanker-tanker minyak, Laut China Selatan mempunyai arti penting bagi perdagangan regional dan internasional. Oleh karena itu tidak heran jika China makin mengukuhkan tuntutannya terhadap kepulauan di kawasan Laut China Selatan yaitu Sparatly dan Paracel yang diperkirakan mengandung sumber minyak yang berlimpah dan merupakan jalur perdagangan yang strategis. Untuk itu China memerlukan Kamboja di dalam ASEAN sebagai *proxy* dalam mewujudkan kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan di Laut China Selatan.

2. Kepentingan Pertahanan

Diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.

Pada sektor pertahanan, Di kawasan Laut China Selatan, dapat dipastikan bahwa China memproyeksikan diri sebagai kekuatan maritim dan mendominasi kekuatannya di kawasan Laut China Selatan.

China memiliki kepentingan untuk meningkatkan keamanan regional melalui Kamboja. Secara geografis, letak Kamboja yang berdekatan dengan Vietnam, dianggap mampu meredam kekuatan militer yang dimiliki Vietnam. Karena letak geografisnya yang strategis terutama dalam mendominasi kekuatannya di wilayah sengketa Laut China Selatan. Upaya China tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan modernisasi militer Kamboja.

3. Kepentingan Ketertiban Dunia

Kepentingan untuk menjaga politik internasional dan sistem ekonomi dengan tujuan negara tersebut merasa aman dan warga negaranya dapat beraktivitas dengan baik di luar negara tersebut.

Dalam konteks permasalahan ini, dimensi kepentingan China untuk menjaga politik internasional tidak cukup relevan. Meskipun China merupakan negara *super power*. Hal tersebut dapat dilihat dari kekuatan militer China yang menduduki peringkat ketiga dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dari aspek ekonomi, meski pun pertumbuhan ekonomi China masih dibawah AS, namun pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat perekonomian China berada diatas negara negara maju Eropa dan Jepang (Agregasi, 2015). Namun kepentingan China di Laut China Selatan terfokus untuk mendapatkan potensi ekonomi dan pertahanan.

4. Kepentingan Ideologi

Kepentingan ideologi adalah perlindungan terhadap nilai-nilai yang dianggap penting dan juga diyakini oleh warga negaranya.

Pada dimensi kepentingan ideologi dalam konteks permasalahan China tidak relevan, meskipun China berupaya menyebarkan budayanya dengan berbagai cara untuk mendapatkan banyak relasi dan memperluas pengaruhnya. Namun China tidak akan menyebarkan ideologi di kawasan Laut China Selatan. berbeda apabila dikaitkan dengan negara-negara yang berada di kawasan Laut China Selatan maka mungkin saja China akan memperluas ideologi nya pada negara-negara kawsan tersebut.

Dalam konteks masalah konflik kawasan Laut China Selatan, menurut penulis dapat dianalisa menggunakan konsep kepentingan nasional. Menurut Donald E Nuechterlin terdapat beberapa dimensi konsep kepentingan yang dapat digunakan untuk menjelaskan prilaku negara yaitu, dimensi kepentingan ekonomi,

kepentingan pertahanan, kepentingan ketertiban dunia dan kepentingan ideologi. Penulis menggunakan dimensi kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan dalam menjelaskan masalah konflik sengketa di kawasan Laut China Selatan.

Kepentingan ekonomi dianggap lebih relevan karena melihat potensi yang ada di Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran lalu lintas kapal-kapal niaga dan tanker-tanker minyak, Laut China Selatan mempunyai arti penting bagi perdagangan regional dan internasional. Untuk itu China memerlukan Kamboja di dalam ASEAN sebagai *proxy* dalam mewujudkan kepentingan ekonomi di Laut China Selatan. China mendapatkan dukungan Kamboja di dalam ASEAN dengan memanfaatkan keadaan perkenomian Kamboja yang tergolong lemah tanpa bantuan China.

Kepentingan Pertahanan juga menjadi relevan karna kebutuhan China akan suatu armada angkatan laut yang kuat dan pangkalan-pangkalan militer yang strategis merupakan suatu syarat yang cukup penting bagi China. Tiap tahunnya anggaran negara untuk militer semakin meningkat. Bahkan anggaran militer China terhitung merupakan anggaran dalam bidang militer terbesar di seluruh dunia. Mengingat penduduk China yang begitu padat, maka hal ini juga secara tidak langsung berpengaruh pada militer China. China memiliki kepentingan untuk meningkatkan keamanan regional melalui Kamboja. Upaya China tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan modernisasi militer Kamboja. Karna Kamboja menduduki peringkat paling bawah sebelum Laos di Asia Tenggara. Letak geografis Kamboja yang strategis untuk mendominasi kekuatannya di wilayah Sengketa Laut China Selatan.

Sedangkan untuk menganalisis strategi China mempegaruhi Kamboja sebagai instrumen dalam konflik di kawasan Laut China Selatan, penulis menggunakan kerangka konseptual *Regional Power Strategy* untuk menemukan jawaban terkait alasan China memilih Kamboja sebagai kawan dikawasan Laut China Selatan.

1.5.2 Regional Power Strategy

Regional power merupakan konsep di dalam ilmu hubungan internasional yang berkembang seiring dengan semakin banyak munculnya negara-negara yang mampu menjadi kekuatan baru di kawasan-kawasan spesifik. Kekuatan regional sering dipandang sebagai "pemimpin regional" sebagai negara yang kooperatif dan murah hati terhadap tetangga mereka. pemimpin regional dapat mengejar berbagai strategi kebijakan luar negeri di wilayah mereka. Tiga strategi regional idealis diidentifikasi: *empire*, *hegemony* dan *leadership*. Di tengah kontribusi ini adalah pemisahan berdasarkan teori dan klarifikasi dari ketiga istilah ini, yang sering membingungkan dan digunakan secara bergantian dalam disiplin hubungan internasional. Fitur utama dari strategi *empire*, *hegemony* dan *leadership* dielaborasi dengan mempertimbangkan tujuan yang ditempuh, cara yang digunakan, dan faktor pembeda lainnya seperti tingkat legitimasi dan representasi diri dari negara yang dominan (Destradi, 2008):

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Sandra Destradi *Empire*, *Hegemony*, dan *Leadership* merupakan jenis strategi *regional power* (Destradi, 2008).

1. Kekuatan (*Empire*)

Empire yang memiliki makna literal "Kekaisaran" disini merupakan istilah dari kekuatan atau kekuasaan atas sebuah luas wilayah. Tipe ini merupakan tipe kekuatan kawasan yang bertumpu pada kepemilikan *power materiil*, yaitu militer dan pertahanan, sebagai dasar untuk mendominasi kawasan (Destradi, 2008). Suatu negara yang jelas dominan dalam hal sumber daya material memiliki opsi untuk menciptakan keamanan bagi dirinya sendiri dalam lingkungan yang dianggap anarkis (menurut perspektif realis) melalui pengejaran sepihak atas kepentingan nasionalnya sendiri, ditopang oleh paksaan dan, jika perlu, penggunaan kekuatan militer. Dalam studi ini strategi negara semacam ini disebut "*empire*".

Semua kekuatan yang mengadopsi strategi *Empire* atau kekaisaran dipaksa untuk menggunakan ancaman intervensi militer jika negara-negara bawahan tidak

mematuhi kehendak mereka, karena jika tidak mereka berisiko kehilangan posisi dominan mereka.

2. Pengaruh (*Hegemony*)

Hegemony atau pengaruh merupakan tipe kekuatan nasional yang secara umum dalam kebijakan luar negerinya menggabungkan *power materiel* dan *power ideasional* secara bersamaan, karena dominasi atas militer dan ekonomi tetap harus diiringi penyebaran nilai-nilai kepada negara-negara *subordinat* agar negara *regional power* dapat dengan mudah mendapatkan konsensus atas tindakan-tindakannya (Destradi, 2008). Di dalam tujuan terhadap kawasannya, *hegemony* berorientasi pada upaya pencapaian kepentingan nasional, namun di dalam praktiknya menggunakan strategi yang lebih halus dibandingkan *empire*. Strategi ini digunakan untuk menyamarkan maksud pencapaian kepentingan nasional, Menunjukkan bahwa *hegemony* hanya ingin memperjuangkan kepentingan bersama kawasan. Terdapat 3 jenis strategi spesifik yang dapat diterapkan oleh *hegemony*, yaitu:

a. *Hard Hegemony*

Hard Hegemony adalah usaha dalam membentuk tatanan atau sistem kawasan dengan menggunakan dominasi yang dimiliki negara kekuatan kawasan terhadap negara-negara *subordinat* (Destradi, 2008). Untuk mencapai kepentingannya, digunakan tekanan dan paksaan seperti *empire*, tidak ada penggunaan kekuatan militer secara langsung seperti intervensi maupun pemberian ancaman perang yang membedakan pada strategi ini. Cara yang digunakan adalah dengan ancaman eksklusi dari institusi maupun kerjasama kawasan, memberikan sanksi politik atau diplomatik (nota protes, penundaan atau pembatalan kunjungan kenegaraan, pembekuan hubungan diplomatik), pengurangan dan pembatalan bantuan luar negeri, pembatalan kesepakatan perdagangan, ancaman non intervensi militer, restriksi kunjungan antar negara, pemberian sanksi ekonomi menutup akses masuk pasar, embargo senjata maupun sanksi finansial, untuk mencapai kepentingan di dalam strategi ini. Pemberian tekanan ini tentu memberikan kesenjangan yang tinggi. Sebagai negara yang ingin

memperjuangkan kepentingan kawasan. Negara *subordinat* dari *hard hegemony* kemudian akan mengikuti keinginan pemimpin regional sebagai timbal balik atas tekanan tersebut, hanya jika akibat dari ketidakpatuhan tersebut akan memberikannya kerugian.

b. Intermediate Hegemony

Intermediate hegemony juga menyamakan kepentingannya, namun ketidaksesuaian antara pernyataan dan sikapnya berada dalam tingkat pertengahan karena sebagian dari kepentingannya merupakan kepentingan yang juga ingin dicapai negara-negara *subordinat*. Strategi yang diterapkan adalah melalui pemberian keuntungan-keuntungan kepada negara *subordinat* seperti pemberian fasilitas perdagangan, asistensi ekonomi (pemberian hutang, bantuan pembangunan), dan pemberian asistensi militer. Melalui instrumen tersebut secara tidak langsung negara-negara *subordinat* akan melakukan perhitungan dan mengikuti arahan dan pengaruh pemimpin *regional* hanya jika negaranya diuntungkan. Dukungan militer juga dapat berperan sebagai hadiah atau insentif untuk perilaku yang patuh. Dalam penelitian Destradi juga dituliskan "Ini adalah pengaruh berdasarkan pada janji A (negara *regional power*) tentang semacam kepuasan tujuan kepada B (negara *subordinat*) dengan syarat bahwa B akan memberikan sesuatu yang bernilai bagi A. "Oleh karena itu, salah satu cara yang digunakan dalam strategi hegemoni menengah adalah suap, yang sesuai dengan "hadiah prabayar" (Destradi, 2008). Keberadaan, pada tingkat tertentu, dari nilai-nilai umum dan tidak adanya ancaman membuat strategi *Intermediate Hegemony* lebih dapat diterima untuk negara-negara bawahan daripada yang "*hard hegemony*".

c. Soft Hegemony

Soft hegemony merupakan *hegemony* yang berusaha mengarahkan tatanan kawasan melalui pembentukan kembali norma dan nilai negara-negara *subordinat* sesuai dengan tatanan normatif yang ingin dibentuknya (Destradi, 2008). Strategi yang diterapkan untuk mencapai tatanan normatif ini adalah persuasi ideologi dan penyebaran pengetahuan secara *transnasional* melalui kontak antar masyarakat

dengan kerjasama transnasional dalam isu tertentu, pertukaran budaya, pertukaran pelajar, dan saluran diplomatik lainnya. Biasanya legitimasi penuh akan diberikan oleh negara *subordinat* jika berhasil dipengaruhi.

3. Kepemimpinan (*Leadership*)

Leadership merupakan tipe yang tidak berfokus pada pencapaian kepentingan nasionalnya, namun lebih kepada peran memimpin dan mengarahkan negara-negara *subordinat* untuk memfasilitasi dan merealisasikan kepentingan bersama (Destradi, 2008). Di dalam praktiknya, terdapat dua jenis strategi yang dapat digunakan oleh *leadership* yaitu:

1. *Leader-initiated*

Leader-initiated adalah kepemimpinan yang diinisiasi oleh *regional power*. Dalam hal ini *Leadership* berperan untuk mengajak negara-negara *subordinat* secara bersama menemukan kesamaan kepentingan atau kepentingan kolektif (Destradi, 2008). Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang diterapkan adalah dengan proses sosialisasi terhadap negara-negara *subordinat*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kesamaan ide, nilai, dan norma, yang kemudian akan merubah negara subordinat menjadi negara pengikut (*follower*). Dengan begitu, negara *subordinat* dengan sukarela mematuhi negara *regional power* dan memberikannya legitimasi penuh.

2. *Follower-initiated*

Follower-initiated adalah kepemimpinan yang diinisiasi oleh negara pengikut atau *subordinat* (Destradi, 2008). Kebutuhan akan adanya negara yang menjadi pemimpin ini muncul dalam kawasan yang sudah menyadari keberadaan kepentingan kolektifnya namun tidak memiliki pengaruh dalam praktiknya. Kepentingan kawasan yang memicu adanya kebutuhan ini adalah adanya hubungan *transnasional* yang erat antar negara-negara kawasan sehingga dibutuhkan aktor yang dapat mengatur hubungan *transnasional* tersebut atau timbulnya ancaman eksternal kepada kawasan yang membutuhkan peran negara yang mampu menyelesaikan krisis. Di dalam tipe ini, *regional power* tidak menerapkan strategi khusus dimana negara-negara subordinat tidak memerlukan

internalisasi norma dikarenakan sudah menerima dan memberikan legitimasi terhadap posisi pemimpin *regional power*.

Dari ke 6 jenis strategi *Regional Power* yang telah dijelaskan diatas penulis melihat jenis strategi *Regional Power* yang paling relevan menggunakan jenis strategi *Regional Power* yaitu *Hegemony*. Dengan menggunakan jenis strategi *Regional Power* yaitu *Hegemony*, dan lebih spesifik lagi menggunakan *Intermediate Hegemony* dimana strategi yang diterapkan adalah melalui pemberian keuntungan-keuntungan kepada negara subordinat seperti pemberian fasilitas perdagangan, asistensi ekonomi (pemberian hutang, bantuan pembangunan), dan pemberian asistensi militer.

Dari penjelasan diatas dapat diidentifikasi bahwa China merupakan negara *Regional Power* dimana China menggunakan strategi melalui pemberian fasilitas perdagangan dengan menjadi mitra dagang dengan kamboja, pemberian bantuan ekonomi berupa pemberian hutang bahkan menjadi investor terbesar di Kamboja, serta bantuan militer yang diberikan China kepada Kamboja karna Kamboja memiliki kekuatan militer yang masih lemah. Dan Kamboja sebagai negara *subordinat* akan mengikuti arahan dan *hegemony* dari China sebagai negara *Regional Power* karena negaranya diuntungkan oleh berbagai bantuan dari China.

Konsep *Regional Power Strategy* diatas akan digunakan untuk menganalisa bagaimana China mempengaruhi Kamboja di dalam organisasi ASEAN untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya dalam konflik Laut China Selatan.

1.6 Argumen Utama

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk menjawab permasalahan dan mengetahui bagaimana China mempengaruhi Kamboja dalam mendapatkan kepentingannya di Laut China Selatan maka penulis berpendapat bahwa argumentasi utama adalah China mempengaruhi Kamboja melalui pemberian bantuan ekonomi dan bantuan militer kepada Kamboja dalam

mewujudkan kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan dalam mendominasi kekuatannya dalam konflik Laut China Selatan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah guna memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Metode merupakan panduan dalam suatu proses pengumpulan data sampai dengan proses analisis data (Gie, 1984).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berarti menggunakan teori/konsep sebagai pemandu fokus penelitian. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang fokus kepada individu, group, komunitas dan kejadian tertentu (Yin, 2013). Teknik dalam penelitian ini mencakup dua cara yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dalam proses penelitian ini. Data yang penulis pergunakan merupakan data sekunder yang berarti penulis tidak berinteraksi langsung dengan objek yang dikaji. Rujukan pustaka dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Buku-buku koleksi pribadi
4. Media internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam upaya menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pada karya ilmiah ini data dikonstruksi secara sistematis berdasarkan fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis. Berdasarkan data-data tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang kemampuan China mendapatkan dukungan dari Kamboja sebagai instrumen di dalam ASEAN untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan Laut China Selatan.

1.8 Sistematika Penulisan

Ada pun sistematikan penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan

Bab ini memberikan pemaparan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian (meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab. II. Konflik dan Dinamika Laut China Selatan

Bab ini menjelaskan letak geografis, aspek strategis kawasan Laut China Selatan dan kekayaan alam yang bernilai ekonomis di kawasan Laut China Selatan, konflik sengketa kawasan Laut China Selatan secara historis, klaim wilayah oleh Vietnam, Filipina, Malaysia Brunei Darussalam dan China, serta Peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan.

Bab. III. Hubungan Bilateral China dan Kamboja

Bab ini memberikan pemaparan tentang hubungan bilateral politik, keamanan dan ekonomi negara China dan Kamboja sebagai strategi China dalam mendapatkan dukungan Kamboja di dalam ASEAN.

Bab. IV. China mendapatkan dukungan Kamboja di dalam ASEAN dalam Konflik Laut China Selatan

Bab ini memberikan pemaparan tentang strategi China mendapatkan dukungan dari Kamboja sebagai kawan di dalam asean pada Konflik Laut China Selatan dan menjelaskan strategi tersebut dengan konsep yang dipilih yaitu kepentingan nasional dan strategi *regional power*.

Bab. V. Kesimpulan

Bab ini memberikan kesimpulan dari pembahasan upaya china dalam mendominasi kawasan Laut China Selatan.

BAB 2. KONLIK DAN DINAMIKA LAUT CHINA SELATAN

2.1 Letak Strategis Laut China Selatan

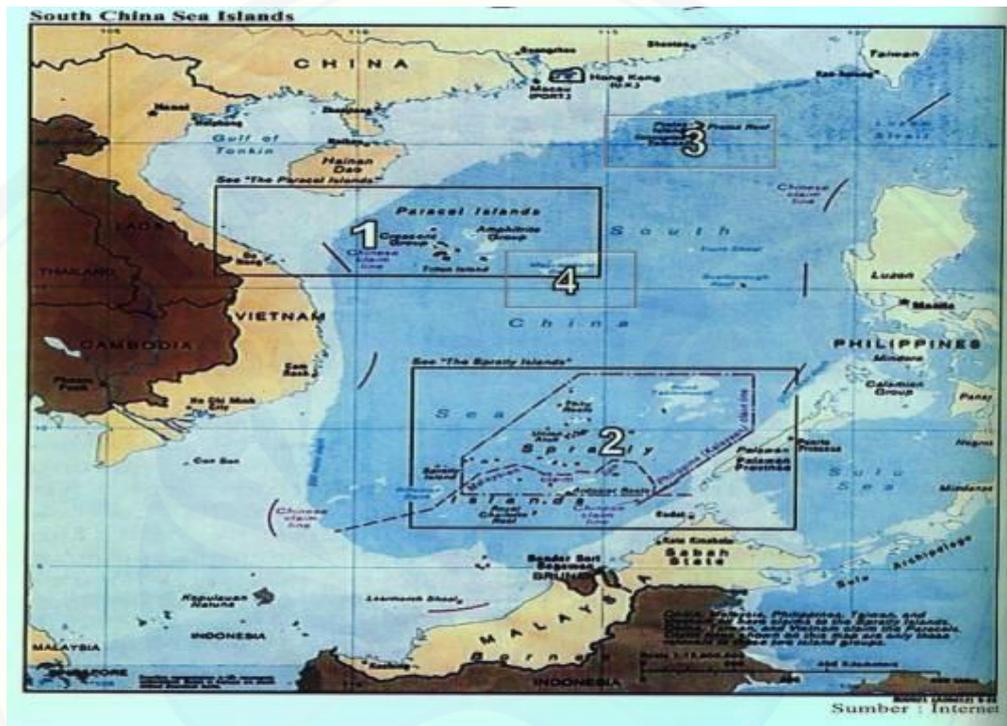
Laut China Selatan, merupakan perairan yang mencakup banyak negara di kawasan Asia Tenggara. Adanya kekayaan sumber daya alam mineral yang terkandung didalamnya, menjadikan negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut saling berebut untuk menguasai secara legal. Selain itu, wilayah tersebut juga merupakan jalur pelayaran yang strategis untuk lalulintas perdagangan dunia. Menurut data dari *U.S. Energy Information Administration* (EIA) cadangan minyak dikawasan perairan tersebut adalah 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat atau sebanyak 213 miliar barel. Kawasan perairan Laut China Selatan juga merupakan jalur perdagangan energi dunia yang penting (U.S. Energy Information Administration, 2013).

Adanya anggapan tentang Laut China Selatan sebagai laut tengah dikarenakan posisi letaknya yang berada diantara Asia dan Australia. Laut ini menghubungkan antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Negara besar maupun Negara kecil yakni vietnam, china, philipina, malaysia merupakan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kawasan Laut China Selatan dikatakan sebagai laut semi tertutup yaitu perairan yang mempertemukan antara Samudra Pasifik dan Hindia. Luas pada kawasan tersebut sebesar 3,5 juta kilometer persegi (Akmal, 2016).

Dilihat dalam segi geografis Kawasan Laut China Selatan memiliki batas 3° LS antara Kalimantan (Selat Karimata) dan Sumatra Selatan. Dilain sisi pada Lautan ini merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari selat Taiwan sampai dengan selat Malaka juga dikelilingi oleh Negara-negara di Asia Tenggara. Kawasan laut china selatan disebut sebagai perairan terluas kedua setelah kelima samudra dengan luas perairan mencapai 4 juta km² (Asnani Usman, 1997).

Laut China Selatan merupakan “laut setengah tertutup” (*semi-enclosed sea*). Dengan pusat dari kepulauan ini sekitar 400km dari Malaysia Timur, 600km

dari Vietnam, 700km dari Manila, 1.100km dari China dan 1.600km dari Indonesia (Asnani Usman, 1997). Di wilayah Laut China Selatan ini tersebar beberapa gugus kepulauan, gugusan pada pulau tersebut antara lain Spratly, Parcel, Maccaliesfield dan Pratas. Pada kawasan ini juga adanya bantaran sungai yang terbentang dari selat Malaka sampai dengan Selat Taiwan yaitu Sungai Maccaliesfield dan Karang Secarborough.



Gambar 2.1 Kelompok gugus kepulauan di Laut China Selatan

Sumber: Mencermati Sengketa Teritorial Laut China Selatan. (Kasus Kepulauan Spratly dan Parcel) (Judiono, 2003)

Gambar 2.1 menunjukkan posisi geografi pulau-pulau yang berada di kawasan Laut China Selatan serta gugusan pulau-pulau yang dipersengketakan termasuk Kepulauan Spratly. Kelompok Gugus Kepulauan Parcel ditunjukkan dengan nomor 1, Kepulauan Spratly nomor 2, Kepulauan Pratas nomor 3 dan Kepulauan Macclesfield nomor 4. Kepulauan Spratly, Parcel, Pratas dan Macclesfield berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara terluar China, sehingga berpotensi menjadi wilayah konflik. Namun Kepulauan yang dipersengketakan adalah Kepulauan Spratly dan Kepulauan Parcel yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Terdapat ratusan pulau-pulau kecil, Shoal, Atol, Cays, Batu, Beting, serta Karang dari barat daya ketimur laut yang terdapat di Kepulauan Spratly ditunjukkan dengan nomor 2 pada gambar 2.1. Kepulauan Spratly juga digambarkan oleh Dieter Heinzig yakni berada di Koordinat: 4° LU - $11^{\circ}30'$ LU dan $109^{\circ}30'$ BT - $117^{\circ}50'$ BT. Dari segi geografis Kepulauan Spratly terletak kurang lebih sekitar 1.100 Km sebelah selatan Pulau Hainan, China dan 500 Km sebelah Utara Pantai Kalimantan (Amin, 2012).

Kepulauan paracel yang ditunjukkan dengan nomor 1 pada gambar 2.1 merupakan gugusan pulau yang lebih kecil dari pada Spratly. Keberadaan pulau Paracel berdekatan dengan china dan vietnam. Pada kepulauan tersebut terdapat adanya atol, gumuk pasir dan karang kecil serta kurang lebih adanya 30 pulau dengan pulau terbesar di Paracel adalah Woody (1,85km persegi) (Asnani Usman, 1997).

Selain itu kepulauan Maccaliesfield Bank ditunjukkan dengan nomor 4 pada gambar 2.1 merupakan salah satu dari gugusan pulau yang terdapat pada Kawasan laut Cina Selatan. Letak Kepulauan tersebut berada diantara Negara China, Taiwan, Philipina dan Taiwan. Maccaliesfield Bank berada sekitar 300km disebelah timur kepulauan Paracel dan seluruhnya merupakan karang (Asnani Usman, 1997).

Sedangkan secara geografis Kepulauan Pratas yang ditunjukkan dengan nomor 3 pada gambar 2.1 berada diantara Negara China, Taiwan dan Filipina. Kepulauan tersebut lebih berdekatan dengan China dan Taiwan yakni tepatnya 300km tenggara Hong Kong , 400km di barat daya Taiwan dan 500km di barat laut pulau Luzon, Filipina (Asnani Usman, 1997). Diantara gugusan pulau yang lain di Laut China Selatan Kepulauan ini menempati pulau paling utara.

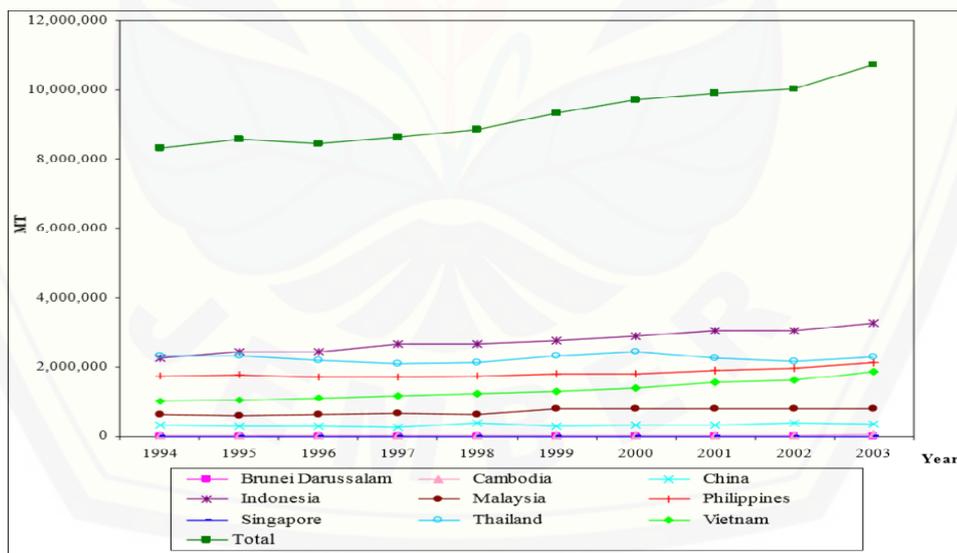
2.2 Potensi di Laut China Selatan

Dilihat dari kondisi dan ukurannya, sebagian besar kepulauan yang ada di Laut China Selatan tidak lebih dari pulau-pulau kecil, bukit pasir, dan batu karang yang berjumlah lebih dari 100 kepulauan. Karena diapit dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, letak Laut China Selatan cukup strategis membuat

perairan ini menjadi jalur pelayaran lalu lintas kapal-kapal dan tanker-tanker untuk berbagai kepentingan ekonomi, politik, maupun keamanan (Asnani Usman, 1997). Dari segi kekayaan alam seperti kekayaan laut baik hayati (perikanan) maupun nonhayati (mineral dan minyak), Laut China Selatan sangat potensial dan mempunyai arti yang sangat penting.

2.2.1 Potensi Sumber daya Alam

Laut China Selatan merupakan wilayah perikanan yang tergolong sangat kaya dengan jenis ikan di dunia. Menurut hasil studi China, spesies yang ada di wilayah Laut China Selatan: 1027 ikan, 91 udang, dan 73 cephalopoda spesies di bagian utara, dan diperkirakan ada 205 spesies ikan dan 96 jenis udang di dalam lereng benua, sedangkan di perairan bagian selatan lebih dari 520 spesies ikan (Khemakorn, 2006). Sumber kekayaan laut ini sangat penting dan berkontribusi besar di tingkat lokal, regional dan internasional. Total produksi di laut China Selatan sekitar 5 juta ton dari hasil tangkapan setiap tahun, dan sekitar 10% dari total hasil tangkapan dunia (Khemakorn, 2006).



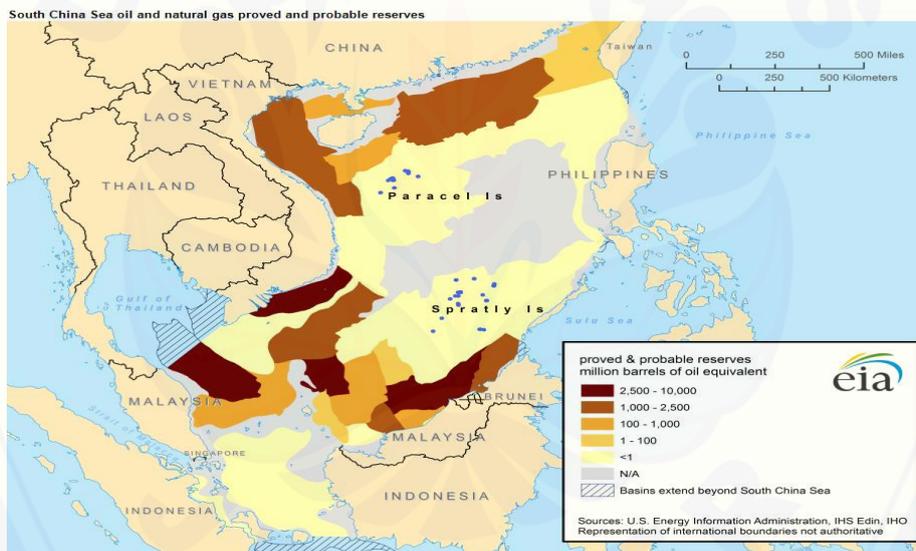
Gambar 2.2 Total Produksi ikan negara wilayah Laut China Selatan

Sumber: *Sustainable Management of Pelagic Fisheries in*. (Khemakorn, 2006)

Dari Gambar 2.2 dapat dilihat produksi ikan negara–negara kawasan Laut China Selatan mencapai total 10 juta ton lebih sejak 1994 sampai 2013, dan rata-rata pertahun produksi ikan terus meningkat. Data itu menunjukkan kekayaan ikan

di perairan Laut China Selatan akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara-negara kawasan Laut China Selatan.

Selain itu, Laut China Selatan juga memiliki sumber kekayaan mineral seperti kobalt, tembaga, timah, fosfat, nodul mangan, terutama gas alam dan minyak. Pada tahun 1995, *Russia's Institute of Geology of Foreign Countries* telah melakukan studi dan memperkirakan bahwa kawasan Laut China Selatan terutama di pulau Spratly dapat mengandung 6 juta barel minyak dan 70% dari jumlah ini mengandung gas alam (Asnani Usman, 1997). Sedangkan menurut data dari EIA cadangan minyak dikawasan perairan tersebut sebanyak 213 miliar barel atau 10 kali lipat dari cadangan minyak milik AS. Kawasan perairan Laut China Selatan juga merupakan jalur perdagangan energi dunia yang penting (U.S. Energy Information Administration, 2013).



Gambar 2.3 Cadangan minyak dan gas alam di Laut China Selatan

Sumber: *The South China Sea is an important world energy trade route.* (U.S. Energy Information Administration, 2013)

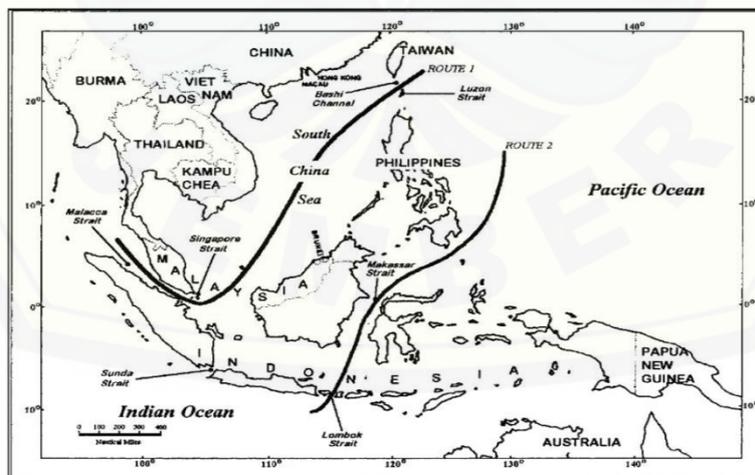
Gambar peta 2.3 menunjukkan potensi minyak yang terkandung di Laut China Selatan. Ditunjukkan dengan warna paling coklat merepresentasikan jumlah minyak yang ada di wilayah tertentu di Kawasan Laut china selatan dengan total 2.500-10.000 miliar barel. Kemudian sampai dengan warna coklat paling muda merepresentasikan minyak yang terkandung kurang dari 1 (<1) miliar barel. Minyak mentah dan gas alam yang ada di Laut China Selatan memang terbilang

melimpah, namun jumlahnya masih kalah jauh dengan Saudi Arabia. Akan tetapi, potensi energi yang ada di Laut China Selatan secara keseluruhan dapat menjanjikan masa depan suatu negara dalam konteks ketahanan atau keamanan energi.

2.2.2 Potensi Strategis Ekonomi

Kawasan Laut China Selatan selain memiliki potensi sumber daya alam juga memiliki potensi strategi ekonomi. Potensi strategi ekonomi di kawasan Laut China Selatan yaitu menjadi jalur pelayaran lalu lintas kapal-kapal niaga dan tanker-tanker minyak. Aktivitas pelayaran baik navigasi maupun perdagangan internasional hampir 41.000 kapal melewati jalur di Kawasan ini setiap tahunnya (Khemakorn, 2006).

Dalam perdagangan regional dan internasional, Laut China Selatan menjadi sangat penting. Dalam perdagangan regional, kawasan Laut China Selatan menjadi jalur pelayaran yang menghubungkan Korea, Jepang, China dan Rusia ke negara-negara Asia Tenggara dan sebaliknya. Dalam perdagangan internasional, perairan Laut China Selatan menjadi jalur pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah melewati Selat Malaka (Asnani Usman, 1997).



Gambar 2.4 Dua jalur utama di Laut China Selatan yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah ke Asia

Sumber: *Sustainable Management of Pelagic Fisheries in*. (Khemakorn, 2006)

Pada gambar 2.4 dapat dilihat 2 jalur utama dikawasan Laut China Selatan yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah ke Asia. Melalui kedua jalur itu dapat diketahui bahwa setiap tahunnya aktivitas pelayaran lebih dari setengah lalu lintas super tanker melalui jalur perairan mulai dari Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok menuju ke Cina, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan serta negara-negara Eropa, Afrika dan Timur Tengah. Dengan kondisi itu, aktivitas pelayaran di Laut China Selatan semakin sibuk dan menjadi lokasi yang strategis untuk transit kapal-kapal tanker.

2.2.3 Potensi Militer

Pada dasarnya kawasan Laut China Selatan merupakan perairan yang dalam dan luas. Kawasan ini cukup strategis untuk mengembangkan kekuatan militer suatu negara berbasis Maritim. Karna letak geografis yang berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, dapat digunakan sebagai jalur kapal-kapal perang.

Kawasan Laut China Selatan cukup efektif untuk aktivitas latihan militer berbasis laut maupun udara. Selain itu, di Laut China Selatan terdapat beberapa gugusan pulau potensial yaitu Paracel dan Spratly yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan militer. Diantara dua gugus kepulauan tersebut yang memiliki banyak pulau dan terluas adalah kepulauan Spratly. Dengan adanya banyak pulau di Spratly, dapat dimanfaatkan dan dibangun pangkalan militer dan penempatan pasukan. Pada potensi militer ini, dapat dilihat dari langkah China yang membangun pangkalan-pangkalan militer di kawasan Kepulauan Spratly. China sedang berusaha mengembangkan kekuatan angkatan lautnya dari status Kekuatan Pantai menjadi Kekuatan Laut Biru (*Blue Water Navy*) untuk memperoleh status sebagai kekuatan maritim yang handal (Asnani Usman, 1997).

Dengan banyaknya potensi yang telah dijelaskan diatas, sangat jelas bahwa perairan Laut China Selatan sangat penting bagi negara-negara kawasan bahkan negara-negara besar yang mempunyai kepentingan-kepentingan di perairan Laut China Selatan.

2.3 Tumpang Tindih Klaim Laut China Selatan

Berbagai macam gugusan pulau yang dipersengketakan, kepulauan Spratly dan Paracel merupakan titik sengketa. Kepulauan Spratly dan Paracel cukup potensial untuk kemungkinan menjadi konflik yang lebih besar di masa mendatang. Bukan hanya karna tuntutan klaim kepemilikan dari ke 4 negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei) dan China, tetapi juga langkah yang diambil pihak bersengketa semakin tegas melancarkan aksinya dalam mengklaim wilayah Laut China Selatan yang dikhawatirkan akan menjadi konflik terbuka di masa depan.

2.3.1 Klaim Vietnam di Laut China Selatan

Vietnam mengajukan tuntutan kepemilikan atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah berabad-abad lalu. Klaim Vietnam berdasarkan perolehan Kaisar Gia Long tahun 1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam tahun 1832. Pendirian tanda batu (*stone tablet*) di pulau spratly oleh Kaisar Minh Mang yang memerintah kerajaan Vietnam pada tahun 1834 (Nguyen, 2012).

Vietnam mengemukakan bahwa banyak dokumen yang menunjukkan kepemilikan vietnam atas pulau-pulau spratly telah dimusnahkan oleh China pada waktu negaranya di jajah oleh China (Asnani Usman, 1997).

Dengan menunjuk pada Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951 Vietnam mengemukakan tuntutannya. Vietnam yang pada waktu itu hadir dan menandatangani perjanjian ini telah menegaskan tuntutan kepemilikannya atas kepulauan spratly seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Vietnam, Tran Van Huu bahwa: "...kami menegaskan hak kami atas kepulauan Spratly dan Paracel, yang selalu menjadi milik Vietnam" (DepartemenLuarNegeri, 1975).

Dari ungkapan Perdana Menteri Vietnam Tran Van Huu membuktikan bahwa China telah melakukan pengeboran minyak di perairan kepulauan paracel dimana daerah ini yang menjadikan dua negara, Vietnam dan Republik Rakyat China dalam permasalahan sengketa di Laut China Selatan. Langkah pengeboran minyak yang telah di lakukan China membuat negara Vietnam seakan tidak terima dengan tindakan tersebut.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh menyebutkan tindakan China tersebut tidak bersahabat. Lalu pihak Vietnam menyampaikan protes dan kekhawatirannya kepada China. Dikutip dari *Offshore Energy Today*, Le Hai Binh juru bicara Kementrian Luar Negeri Vietnam mengatakan:

. “Vietnam meminta China untuk tidak melakukan aktivitas pengeboran minyak dan menarik alat pengebor minyak Hai Duong 981 dari area ini, Semua hak hukum dan kepentingan di daerah tersebut harus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (Offshore Energy Today, 2016)”.

Ungkapan Le Hai Binh diatas membuktikan aktifitas eksplorasi China di wilayah Laut China Selatan semakin gencar dilakukan dengan melakukan pengeboran minyak. Namun menurut Le Hai Binh tindakan China tersebut telah melanggar hukum internasional dan melampaui batas wilayah vietnam dan meminta aktivitas yang dilakukan China dihentikan melalui protesnya.

2.3.2 Klaim Filipina di Laut China Selatan

Setelah mendapat kemerdekaan dari AS, Filipina mulai memperhatikan pulau-pulau Sparatly dan mengajukan tuntutan kepemilikan dalam sidang majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1946. Dikutip dari buku Konfik Laut China Selatan Tantangan bagi ASEAN oleh Asnani Usman dan Rizal Sukma, Setelah merdeka, Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa *the New Southern Islands* (istilah Jepang untuk pulau-pulau di Laut China Selatan) diserahkan Jepang kepada Filipina (Asnani Usman, 1997).

Pada tahun 1956, Menteri Luar Negeri Filipina Carlos Garcia mengklaim kepulauan Sparatly dan mendasarkan tuntutannya kepada doktrin kedekatan (*proximity*) dan kebutuhan yang mendesak bagi pertahanannya (Heinzig, 1976).

Filipina termasuk salah satu negara yang menolak klaim sepihak China atas Laut China Selatan, jalur laut tersibuk di dunia. Beberapa negara Asia Tenggara juga memiliki klaim serupa dan perselisihan ini memicu kekhawatiran menimbulkan konfrontasi militer yang bisa mengganggu perdagangan global.

Filipina ingin menyelesaikan sengketa tersebut dengan cepat agar tidak ada lagi permasalahan sengketa di Laut China Selatan. Sebelumnya, Filipina telah

membawa permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan tinggi Internasional dan menentang apa yang telah di sebutkan oleh China yaitu dengan sebutan “nine dash line” dimana seluruh perairan Laut China Selatan adalah milik China (BBC, 2015).

Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di LautChina Selatan.dikutip dari detiknews, Putusan tersebut berisi “China telah melanggar kedaulatan negara Filipina. Karena China telah melakukan penangkapan ikan, membangun pulau buatan, eksplorasi minyak dan tidak melarang nelayan China melakukan di zona tersebut. tindakan tersebut terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina” (Detik, 2016). Namun Pemerintah China tidak menerima putusan tersebut.

2.3.3 Klaim Malaysia di Laut China Selatan

Tuntutan Malaysia Tuntutan Malaysia atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah pendudukan Inggris. Pada abad ke-18 Inggris telah menguasai Kepulauan Separatly sabagai bagian dari Sabah dan Sarwak. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1979 yang mempublikasikan peta Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusifnya yang mencakup Swallow Reef, Mariveles Reef, dan Dallas Reef (Asnani Usman, 1997).

Malaysia telah menduduki ketiga pulau itu yang dianggap terletak di wilayah mereka walaupun batas garisnya ditarik lurus dari 2 garis batas Brunei. Malaysia telah berusaha membuat atol (pulau karang) dengan membawa tanah dari daratan dan telah membangun sebuah hotel di wilayah itu (Khemakorn, 2006).

2.3.4 Klaim Brunei Darussalam di Laut China Selatan

Brunei Darussalam merupakan negara terbaru yang terlibat sengketa Laut China Selatan, Tuntutan Brunei di Laut China selatan ditujukan atas Lousia Reef. Pulau tersebut dianggap sebagai wilayah Brunei yang berada di Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusifnya.

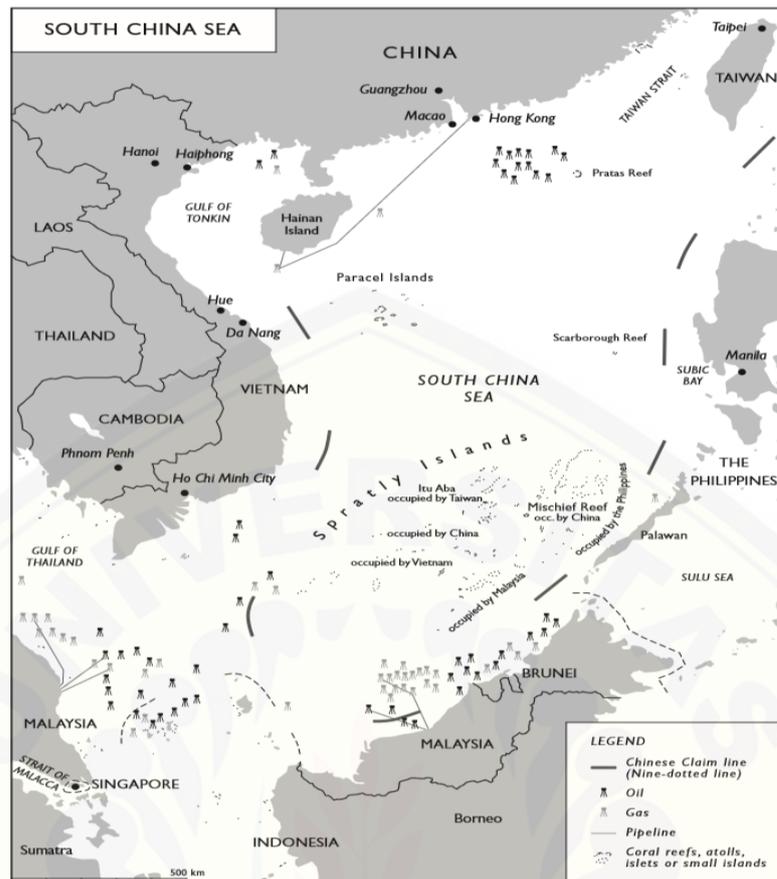
Brunei Mengajukan gugatan terhadap Peta Kuala Lumpur yang mencakup Lousia Reef pada tahun 1979 yang disebut Terumbu Semarang Barat ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia (Asnani Usman, 1997). Namun Sampai Saat ini Brunei belum menduduki satu pulau pun seperti Malaysia.

2.3.5 Klaim China di Laut China Selatan

Tuntutan China di Laut China Selatan ditujukan atas kepulauan Spratly. Bagi China, kepulauan Spratly sudah merupakan bagian dari China sejak jaman Dinasti Han, Yuan, dan Ming. Tuntutan China berdasarkan catatan sejarah, dan dokumen-dokumen kuno. Selain itu, China merujuk pada Perjanjian China dan Perancis tahun 1887 (ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis) dimana kepulauan Spratly dan Paracel diserahkan kepada China (Asnani Usman, 1997).

China berulang kali menegaskan kedaulatannya atas kepulauan Spratly. Pada tahun 1947, China menempatkan pulau-pulau Spratly dibawah yurisdiksinya sebagai bagian dari provinsi Guangdong. Klaim China terhadap kepulauan Spratly baru dilontarkan kembali pada tanggal 5 Agustus 1951, yaitu sebelum dilangsungkannya Konferensi Perdamaian San Fransisco bulan September. Menteri Luar Negeri China pada waktu itu, Zhou Enlai, menegaskan bahwa kepulauan Spratly selalu merupakan bagian dari wilayah China (Heinzig, 1976).

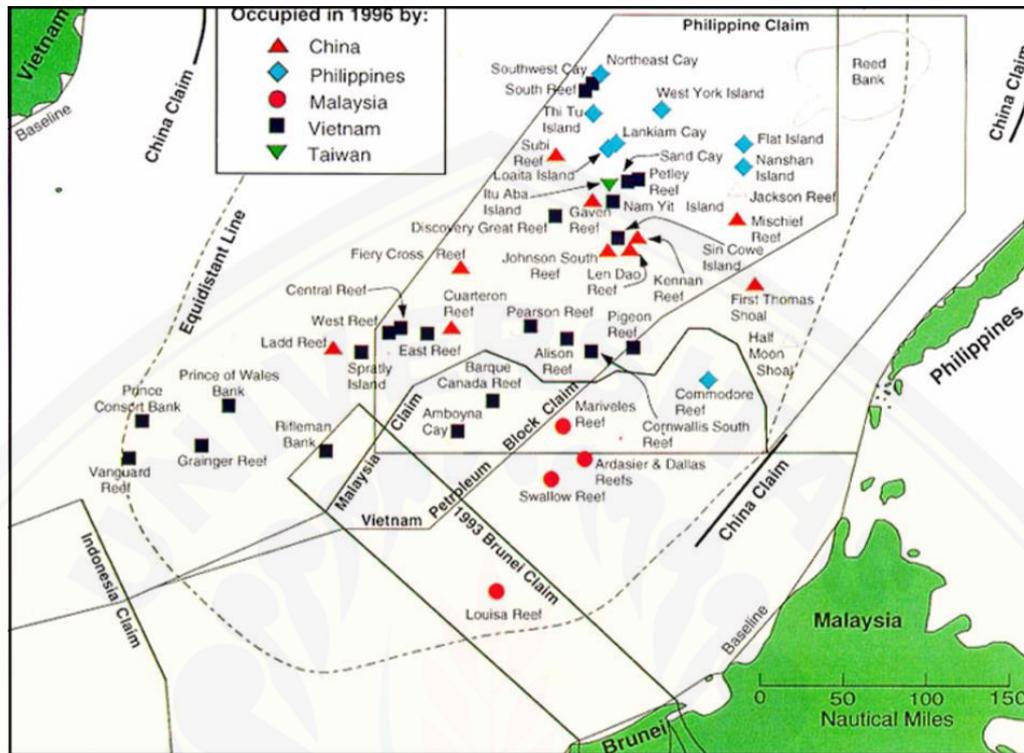
Selain itu pada tahun 1947 China telah mengemukakan tuntutan nya atas pulau-pulau di Laut China Selatan sebagai tuntutan sejarah berupa 9 garis putus-putus (*nine dash line*) yang dibuat oleh pemerintah Kuo Mintang.



Gambar 2.5 Tuntutan China dengan 9 garis putus-putus (*nine dash line*)

Sumber: *China and the South China Sea: Two Faces of Power in the Rising China's Neighborhood Policy*. (Beukel, 2010)

Pada gambar 2.5 telah menunjukkan *Nine Dash Line* yang di tarik dari Pulau Hainan, turun ke tenggara Vietnam, dilanjutkan utara Pulau Natuna, ke tenggara tepatnya di utara Malaysia, naik ke sebelah timur Spratly Island, kemudian di sebelah barat Philipina dan berakhir di Tenggara Taiwan. Namun garis putus-putus itu tidak mempunyai batas-batas yang jelas karna tidak mempunyai koordinat dan definisi yang jelas. Tuntutan ini juga tidak menjelaskan apakah yang dituntut dalam garis putus-putus itu hanyalah pulau-pulau yang terletak didalamnya atau seluruh lautan yang ada dalam garis putus-putus tersebut (Asnani Usman, 1997).



Gambar 2.6 Lokasi Pulau-pulau yang telah diduduki oleh negara-negara bersengketa

Sumber: *Sustainable Management of Pelagic Fisheries in*. (Khemakorn, 2006)

Bedasarkan klaim diatas, bagi negara-negara yang mengklaim merasa berhak menduduki atau memperluas pendudukan mereka atas pulau-pulau sparatly dan paracel. Dapat dilihat pada gambar 2.6 dalam usaha memperkuat tuntutan mereka, negara-negara bersengketa makin memperluas pendudukan atas pulau-pulau dikwasan Laut China Selatan dengan tindakan lebih nyata.

Menurut sumber lain, dalam buku “Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN”, pendudukan pulau-pulau di Laut China Selatan sejak 1970-an telah banyak penempatan pasukan, pendirian bangunan-bangunan bahkan dijadikanya obyek wisata di pulau-pulau yang telah dikuasai oleh pihak-pihak yang bersengketa (Asnani Usman, 1997).

Letak Strategis Laut China Selatan berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara terluar China. Jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah dengan Asia. Laut

China Selatan memiliki Kekayaan Sumber daya Laut, dan menjadi Jalur pelayaran kapal perdagangan bahkan kapal perang merupakan potensi strategis yang ada di Laut China Selatan. Dari berbagai Potensi yang ada dan letak strategis, sangat jelas bahwa perairan Laut China Selatan sangat penting bagi negara-negara kawasan bahkan negara-negara besar yang mempunyai kepentingan-kepentingan di perairan Laut China Selatan. Sehingga Laut China Selatan berpotensi menjadi wilayah konflik.

ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara dibutuhkan sebagai penengah dalam konflik Laut China Selatan karena keterlibatan 4 negara anggota ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. ASEAN telah hadir dan berupaya meredam ketegangan konflik Laut China Selatan antara China dengan 4 negara anggota ASEAN yakni Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam agar konflik Laut China Selatan ini tidak menjadi konflik terbuka dan berdampak global.

2.4 Peran ASEAN dalam Konflik Laut China Selatan

ASEAN dibutuhkan dalam penyelesaian konflik sengketa Laut China Selatan. ASEAN berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan ini seperti pada prinsip-prinsip negara anggota ASEAN yang termuat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* of 1976 (ASEAN):

1. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all nations;*
2. *The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*
3. *Non-interference in the internal affairs of one another;*
4. *Settlement of differences or disputes by peaceful manner;*
5. *Renunciation of the threat or use of force; and*
6. *Effective cooperation among themselves.*

Pada prinsip negara anggota ASEAN diatas, telah tercantum penyelesaian permasalahan menggunakan cara damai, penolakan menggunakan kekerasan, kerja

sama internal, dan bebas dari campur tangan pihak luar. Ini membuktikan bahwa ASEAN akan menyelesaikan konflik Laut China Selatan semaksimal mungkin agar ketegangan konflik Laut China Selatan tidak memicu menjadi daerah sengketa yang berdampak global.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah sebagai berikut:

2.4.1 ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan

Pertemuan negara anggota ASEAN diadakan dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan. ASEAN berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan, ketika para Menteri Luar Negeri menandatangani *Declaration on the Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN)* pada tahun 1971. Deklarasi ZOPFAN merupakan sikap ASEAN yang tidak mau menerima keterlibatan terlalu jauh negara-negara besar dari luar regional, seperti Amerika Serikat, China, Uni Soviet dan Jepang. ASEAN berusaha mendapatkan pengakuan dan penghormatan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar.

Pada salah satu kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dengan Pham Binh Minh, Menteri Luar Negeri Vietnam, berhasil mendiskusikan beberapa ide yang berkaitan dengan hal-hal yang mempersatukan ASEAN. Ide tersebut, antara lain (Harahap, 2016):

1. Perlunya reafirmasi mengenai the *Declaration on the Conduct of Parties* kepada semua pihak di Laut China Selatan
2. *Declaration on the Conduct of Parties (DoC)* perlu dipertegas
3. Perlunya penegasan mengenai pentingnya suatu *Code of Conduct*
4. Penghormatan terhadap hukum internasional dan
5. Konvensi PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS, serta
6. Penyelesaian masalah secara damai sesuai dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

Selain itu pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi di Jakarta, kedua negara sepakat untuk meningkatkan stabilitas di kawasan Laut

China Selatan. ASEAN berhasil menandatangani *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DoC) dengan Cina tahun 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan China untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut China Selatan, penyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik.

2.4.2 Penerapan kode etik konflik Laut China Selatan (CoC)

Penyusunan Kode Etik Konflik di Laut China Selatan (CoC) adalah upaya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik terbuka. Fungsi CoC ini adalah sebagai sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif. Serta berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan. Konflik di Laut China Selatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi oleh negara-negara ASEAN untuk membuat aturan larangan berkonflik dengan sesama anggota maupun dengan negara mitra di luar kawasan.

Selain untuk menyelesaikan konflik, CoC juga diharapkan nantinya dapat mengembangkan kerja sama di Laut China Selatan antar sesama negara anggota maupun dengan negara di luar kawasan ASEAN. Namun pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 6 April 2012 ASEAN Kamboja tidak sepakat dan menolak untuk bersikap terkait aksi China di Laut China Selatan, dan berpendapat bahwa masalah wilayah itu selayaknya ditangani diantara pihak bersengketa dan tidak melibatkan kelompok kawasan ASEAN, kebuntuan politik pun terjadi di dalam ASEAN. Persatuan ASEAN menjadi rusak akibat Kamboja yang menjadi tuan ketua dalam pertemuan itu mendapatkan tekanan dari China (Mahbubani & Sng, *ASEAN Miracle A Catalyst for Peace*, 2017, hal. 142).

Kegagalan ASEAN dalam memberikan solusi bagi upaya penyelesaian sengketa hanya akan membuat Vietnam dan Filipina beralih ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang China di kawasan. Pada akhirnya permasalahan

sengketa wilayah antar beberapa negara Asia Tenggara dengan China turut menjadi permasalahan ASEAN mengingat dampaknya yang tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan namun juga global.

2.4.3 Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF)

Dalam konflik Laut China Selatan, ASEAN berada diposisi krusial dimana China telah melakukan latihan angkatan lautnya di daerah perairan tersebut. Pada ARF ke-2 China menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan Konflik Laut China Selatan dengan negara ASEAN tanpa keterlibatan pihak luar kawasan.

Mengoptimalkan peran *ASEAN Regional Forum* sebagai badan yang mampu lebih menjawab tantangan keamanan, kedepannya, terutama permasalahan isu tradisional dan nontradisional. Beberapa optimalisasi peran ARF dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah sebagai berikut (Harahap, 2016):

1. Penataan ulang prinsip *noninterference* (*Constructive Engagement dan Proactive Engagement*),
2. Memaksimalkan implementasi kebijakan *Code of Conduct* (CoC) dan *Declaration on the Conduct* (DoC) *of Parties in the South China Sea*, dan
3. Menyatukan perspektif dan mengesampingkan kepentingan antar negara-negara anggota ASEAN.

Dari penjelasan diatas, ASEAN diharapkan mampu untuk memenuhi dan merealisasikan upaya-upaya penyelesaian konflik yang berkempanjangan, dengan begitu akar permasalahan tidak akan muncul kembali. Dan diharapkan mampu memenuhi cita-cita untuk mempromosikan perdamaian yang tercantum di dalam Piagam ASEAN.

Berbagai upaya yang dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah dilakukan dengan cara perundingan damai berdasarkan peraturan hukum internasional. Untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di ASEAN, upaya-upaya ASEAN diharapkan mampu menjaga relevansi dan signifikan dalam proses mengelola dan mengupayakan penyelesaian konflik yang berkepanjangan. Komitmen China terhadap pernyataan damai dalam

menghadapi isu sengketa semakin tinggi karena nilai-nilai ASEAN yang terwujud dalam ARF maupun KTT ASEAN.

Dari berbagai Potensi yang ada dan letak strategis, sangat jelas bahwa perairan Laut China Selatan sangat penting bagi negara-negara kawasan bahkan negara-negara besar yang mempunyai kepentingan-kepentingan di perairan Laut China Selatan. Sehingga Laut China Selatan berpotensi menjadi wilayah konflik. ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara telah hadir dan berupaya meredakan ketegangan konflik Laut China Selatan antara China dengan 4 negara anggota ASEAN yakni Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.



BAB 3. HUBUNGAN BILATERAL CHINA DAN KAMBOJA

3.1 Gambaran Umum Negara Kamboja

Kamboja merupakan negara kawasan Asia Tenggara dan secara geografis terletak di semenanjung Indochina. *Kingdom of Cambodia* nama resmi negara Kamboja yang mempunyai nama lain *Kampuchea* (bahasa Khmer) dan *Cambodia* (bahasa Inggris) merupakan suatu negara yang memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 9 November 1953. Bahasa nasional negara Kamboja menggunakan bahasa Khmer dan 95% Masyarakat Kamboja menganut agama Budha Theravada (Fadlan, 2014).

Sebagian besar wilayah Kamboja terdiri dari daratan rendah yang dikelilingi pegunungan di Utara dan dilalui oleh sungai Mekong yang menghubungkan China, Laos, dan Vietnam. Luas Wilayah Kamboja seluas 181.040 km dan Mayoritas penduduk Kamboja adalah etnis Khmer (Kementerian Luar Negeri, 2008).



Gambar 3.1 Peta Kamboja

Sumber : *The Kingdom of Cambodia, From Reconstruction to Sustainable Development (Country Study for Cambodia's Officially Study for Japan's Development , 2002)*

Dari gambar 3.1 dapat dilihat Kamboja negara yang berbatasan langsung dengan Vietnam di sebelah Selatan, Laos di sebelah Utara, dan Thailand di

sebelah Barat. Ibu kota Kamboja terletak di Phnom Penh dan terbagi dalam 20 Provinsi. Karna berbatasan langsung dengan negara Vietnam, Laos dan Thailand, Kamboja salah satu negara Asia Tenggara yang rawan Konflik. Tidak hanya terlibat konflik dalam negeri, Kamboja juga sering dilibatkan dalam perang oleh negara tetangga antara Vietnam dan Thailand yang saling berebut wilayah.

3.1.1 Kondisi Politik

Kamboja merupakan negara yang memiliki sejarah politik yang pahit. Sejak merdeka dari penjajahan Prancis pada 9 November 1953 dibawah kepemimpinan Norodom Suramarit dari tahun 1955 sampai tahun 1960, Kamboja menghadapi kekacauan politik dalam negeri. Munculnya faksi-faksi politik dalam negeri menyebabkan pemerintahan kerajaan Kamboja tidak kondusif (Mubyarto, 1999). Pada tahun 1960 Norodom Suramarit digantikan oleh Pangeran Norodom Sihanouk pada tahun 1960 sampai tahun 1970.

Pergantian kepemimpinan Kamboja tidak kunjung meredakan kekacauan kondisi politik di Kamboja. Pada tahun 1970 Lon Nol mengambil alih kepemimpinan di Kamboja dari Sihanouk dari tahun 1970 sampai tahun 1975. Pada tahun 1975 kepemimpinan Lon Nol di Kamboja digantikan oleh Pol Pot dari tahun 1975 sampai tahun 1979 (Mahbubani & Sng, 2017). Kekacauan politik yang terjadi mengakibatkan negara Kamboja harus berganti nama negaranya hingga 5 kali. Kekacauan tersebut juga berdampak pada tidak kunjung disahkan keanggotaan negara Kamboja dalam Organisasi Regional ASEAN.

Selain faktor dalam negeri, juga terdapat faktor eksternal yang menyebabkan kekacauan politik negara Kamboja. Faktor eksternal kekacauan politik negara Kamboja, disebabkan oleh perebutan pengaruh oleh negara-negara tetangga. Selama periode hampir 40 tahun sejak Kamboja merdeka dari penjajahan Prancis, negara Kamboja menjadi perebutan pengaruh diantara perang Vietnam dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 1970-an Kamboja terseret ke dalam perang Vietnam. Kamboja dibawah pemerintahan Pangeran Sihanouk mengizinkan wilayah Kamboja untuk dijadikan tempat persinggahan tentara Vietnam. Vietnam utara menggunakan

wilayah Kamboja untuk mengirimkan perbekalan ke Vietnam Selatan. Persetujuan Kamboja atas penggunaan wilayahnya digunakan sebagai jalur perbekalan pasukan Vietnam menyebabkan peristiwa pemboman oleh Amerika Serikat ke negara Kamboja. Misi yang diusung Paman Sam dalam menyerang Kamboja dikenal sebagai 'Menu Pemboman'. Sebanyak 3.630 penerbangan atas Kamboja menjatuhkan 110 ribu ton bom selama periode 14 bulan hingga April 1970 (Utama, 2016). Pemboman oleh Amerika Serikat ke negara Kamboja menyebabkan negara tersebut mengalami kehancuran.

Peristiwa pemboman oleh Amerika Serikat ke Kamboja mendorong Lon Nol untuk mengakhiri kepemimpinan Sihanouk di pemerintahan Kamboja. Dibawah kepemimpinan Lon Nol Kamboja merubah bentuk sistem kenegaraan dari kerajaan menjadi negara republik. Akan tetapi kekuasaan Lon Nol di Kamboja tidak berlangsung lama, pada tahun 1975 pemerintahan Khmer Republic diganti oleh Democratic Kamphucea di bawah kepemimpinan Pol Pot, Khmer Merah. Dibawah kepemimpinan Pol Pot, Kamboja menjadi condong pada konsep kenegaraan Marxisme – Leninisme (Zaneta, 2015). Kondisi tersebut mendorong keharusan Kamboja untuk membangun kembali negaranya dalam banyak sektor diantaranya, sektor ekonomi, sosial dan politik.

Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar berdasarkan konstitusi 1993. Kepala Negara dipimpin oleh Raja sedangkan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Sejak tahun 1985 Hun Sen menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja dan bertahan sampai pemilu 2013 lalu yang dimenangkan oleh Partai Rakyat Kambodia (*Cambodia People's Party*/CPP). Kemengan CPP pada pemilu 2013 memperpanjang masa jabatan Perdan Menteri Hun Sen selama 5 tahun kedepan dan menandai dominasi Hun Sen dan CPP belum luntur selama 28 tahun (Permana, 2015).

Dengan melihat hasil pemilu 2013, Kamboja harus menghadapi dominasi Hun Sen dan CPP. Hun Sen terus berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Ambisi Hun Sen untuk mempertahankan kekuasaannya terlihat dari

pernyataannya: *“If I am still alive, I will continue to stand as a candidate until I am 90 (Ian Storey, 2009).”*

Dari Pernyataan Hun Sen di atas terbukti bahwa Perdana Menteri Kamboja yang menjabat sejak 1985 sampai saat ini masih memiliki ambisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun tidak menutup kemungkinan stabilitas politik dan ekonomi di Kamboja akan berkembang meskipun Kepala Pemerintahan Kamboja masih diduduki oleh orang yang sama sejak 28 tahun yang lalu.

3.1.2 Politik Luar Negeri Kamboja

Hubungan bilateral Kamboja dan China semakin membaik sejak dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen. Kamboja dan pemerintah China mengesampingkan permusuhan masa lalu untuk membangun kembali kemitraan instrumental antara kedua negara. Setelah pemilihan pada tahun 1993, CPP menengahi sebuah kompromi di mana Hun Sen sebagai perdana menteri (Mahbubani & Sng, ASEAN Miracle A Catalyst for Peace, 2017). Ketika para pemimpin CPP mencari dukungan internasional - terutama setelah Juli 1997, Hun Sen pada saat itu mendapat kecaman dari kekuatan Barat karna memegang kendali pada serangkaian bentrokan. Menghadapi pengucilan dari Barat, CPP memeluk bantuan China dan membalas dengan memutus hubungan dengan Taiwan. China juga memberi Kamboja sekitar \$ 600 juta dalam investasi dan bantuan pembangunan antara tahun 1997 dan 2005 dan mendukung Kamboja dengan membantu memblokir pengadilan internasional murni untuk Khmer Rouges (Ciorciari, 2013).

Beberapa hari sebelum pembicaraan ASEAN Juli 2012, Hun Sen bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi, dan Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan:

“Cambodia appreciates the valuable support and help of the Chinese government and people for Cambodia’s economic and social development. The people of Cambodia are deeply moved by the fact that China has always lived up to its word...The Chinese side appreciates the long-standing, firm support of Cambodia for

China on issues that concern China's core interests...." (Ciorciari, 2013).

Pernyataan diatas dapat dipahami timbal balik dari hubungan China dan Kamboja. China memberikan bantuan ekonomi dan pertahanan politik yang dapat diandalkan terhadap kedaulatan Kamboja, dan sebagai imbalannya Kamboja menyediakan akses ke sumber daya dan tunduk pada isu-isu yang menjadi perhatian utama China yaitu isu Laut China Selatan.

Hubungan China Kamboja telah menguat selama lima belas tahun terakhir terutama karena pembuat kebijakan di Phnom Penh yang mampu meraup keuntungan ekonomi dan politik yang cukup besar dari China. Sementara para elit Kamboja yang berkuasa telah mencari peluang untuk bantuan pembangunan, dan kekuatan politik yang semuanya didukung oleh China secara konsisten. Seiring waktu berjalan ekonomi politik Kamboja telah berevolusi untuk membuat negara dan elitnya semakin bergantung pada bantuan China dan dengan demikian Kamboja terikat pada kebijakan China.

3.1.3 Perekonomian Kamboja

Pertumbuhan perekonomian Kamboja hanya terfokus pada sektor agraris yaitu pertanian dan perkebunan. Pada komoditi pertanian, Kamboja fokus memproduksi pada tanaman padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, gula dan kedelai. Komoditi pertanian menjadi keunggulan pendapatan negara Kamboja (Kementerian Luar Negeri, 2008).

Tabel 3.1 Hasil Komoditi Pangan tahun 1994-1995 (dalam satuan Ha)

Komoditi	Kamboja (ton)	Laos (ton)	Vietnam (ton)	Indonesia (ton)
Padi	1,4	2,7	3,6	4,3
Jagung	1,7	2,2	2,2	2,3
Ketela Pohon	6,0	13,7	8,9	12,2
Ketela Rambat	6,0	7,7	6,1	9,5
Gula	33,3	29,9	49,7	74,7
Kedelai	2,2	0,9	1,0	1,1

Sumber : Kemiskinan di Vietnam, Laos, dan Kamboja (Mubyarto, 1999)

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa hasil padi Kamboja yang merupakan makanan pokok di Asia Tenggara mencapai 1,4 ton per Ha, masih dibawah dari hasil Laos yang mencapai 2,7 ton, Vietnam 3,6 ton, dan Indonesia mendapatkan hasil tertinggi yang sudah mencapai 4,3 ton per Ha. Satu satunya komoditi pertanian yang sangat berhasil di Kamboja adalah Kacang kedelai yang mencapai 2,2 ton per Ha, tertinggi diantara negara Laos, Vietnam, bahkan Indonesia hanya mencapai 1,1 ton per Ha. Namun pendapatan yang dihasilkan dari komoditi pertanian tersebut masih belum cukup mampu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui sektor perekonomian Kamboja.

Pada masa Republik Demokratik, perekonomian Kamboja sempat menurun. Namun, Kamboja menunjukkan kemajuan yang sangat pesat pada tahun 1990-an. Pendapatan perkapita Kamboja meningkat secara signifikan walaupun masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lain. Sektor agraris menjadi penompang utama kehidupan ekonomi masyarakat kamboja. Selain itu pada bidang tekstil, pariwisata juga berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Kamboja (Kementerian Luar Negeri, 2008).

Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 membuat perekonomian Kamboja mengalami penurunan. Tingkat pendapatan perkapita atau Produk Domestik Bruto negara Kamboja menurun. Kekacauan ekonomi ini mendorong terjadinya kerusuhan dan kekerasan terjadi di Kamboja, sehingga investasi asing dan perekonomian Kamboja kembali melemah (Pangestu).



Gambar 3.2 Produk Domestik Bruto Kamboja tahun 2006-2016

Sumber : *Cambodia GDP* (Trading Economics)



Gambar 3.3 Pendapatan per kapita Kamboja tahun 2006 – 2016

Sumber : *Cambodia GDP* (Trading Economics)

Dari Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kamboja Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2009 dimana saat terjadi krisis global, ekonomi kamboja mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2008-2009 PDB Kamboja menurun hingga mencapai angka 0,1%. Meskipun pada era krisis global yang terjadi di tahun 2008-2009 ekonomi Kamboja mengalami penurunan hingga 0,1% namun, pada tahun-tahun berikutnya ekonomi Kamboja mampu bangkit mencapai angka 7%. Kamboja dapat dikatakan mampu menstabilkan pertumbuhannya dari titik terendah sampai pada tahun-tahun berikutnya yang meningkat secara signifikan.

Sedangkan pada gambar 3.3 Sejak tahun 2008 sampai pada tahun 2016 pendapatan per kapita negara Kamboja mengalami peningkatan. Diketahui perhitungan rata-rata pendapatan perkapita Kamboja pertahun mencapai 621.03

USD. Kenaikan angka pertumbuhan ekonomi Kamboja dalam beberapa kurun tahun terakhir tidak lepas atas peran dan dukungan dari China. Prestasi tersebut juga membuat negara Kamboja lebih diperhitungkan sebagai negara ekonomi kuat oleh negara lain, khususnya negara-negara kawasan ASEAN.

Kamboja mengalami peningkatan infalsi pada tahun 2008. Namun pada tahun berikutnya kamboja mampu memperbaiki perekonomiannya dari tingkat inflasi yang dialami oleh negaranya.

Terakhir	Sebelumnya	Min	Max	Satuan	Frekuensi	Jarak
▲ 2.9 2018-06	▲ 2.9 2018-05	-5.7 2009-05	34.2 2008-05	%	Bulanan	2004-12 - 2018-06 Diperbaharui pada 02 Oct 2018

Gambar 3.4 Tingkat Inflasi di Kamboja

Sumber : Kamboja (CEIC)

Dari Gambar 3.4 Tingkat inflasi di Kamboja tercatat sebesar 34,2% pada tahun 2008 dan menjadi tingkat inflasi terbesar sepanjang tahun sejak tahun 2004-2018. Selain tekanan ekonomi global, kondisi dalam negeri Kamboja. juga menjadi pemicu tingginya tingkat inflasi. Tingkat inflasi bahan pokok di negara tersebut pada tahun 2008 bahkan mencapai 34,2 %. Tingkat inflasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fluktuasi tingkat inflasi menggambarkan harga dalam negeri yang tidak stabil. Naik atau turunnya tingkat inflasi serta tekanan mata uang asing yang berdampak pada aktivitas perdagangan cenderung akan mengakibatkan gejolak dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi pun dengan sendirinya akan terganggu. Kamboja memiliki masalah serius dalam mengembangkan perekonomiannya, Untuk itu Kamboja membutuhkan bantuan dan investasi asing. China hadir sebagai investor dan pemberi bantuan kepada Kamboja membuat pertumbuhan perekonomian Kamboja menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam mengembangkan sektor ekonominya, Kamboja melakukan berbagai usaha salah satunya dengan bergabung dan menjadi salah satu negara pendiri *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Perdana Menteri Kamboja

Hun Sen hadir untuk mengesahkan perjanjian pendirian AIIB pada 13 Januari 2016 (Harian Analisa, 2016). AIIB adalah sebuah lembaga keuangan multilateral yang dipelopori oleh China yang menyediakan dan auntuk proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik.

Menurut Ketua divisi ekonomi, perbankan, finansial dan audit parlemen Kamboja Cheam Yeap, Kamboja akan menginvestasikan dana senilai 62,3 juta USD untuk mendapatkan nilai saham sebanyak 623 yang setara dengan 0,0635 dari seluruh total modal AIIB. Kemudian Kamboja akan berkontribusi 20% atau senilai 12,46 juta USD dari seluruh total investasinya di AIIB pada tingkat awal dan akan membayar sisanya dalam beberapa tahap selama 10 tahun kedepan (Harian Analisa, 2016).

Dengan didirikannya AIIB ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi China, akan tetapi juga berdampak pada negara investor dan peminjam. Pembangunan infrastuktur maritim kawasan yang disponsori oleh China, dengan sendirinya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi ASEAN. Kehadiran AIIB menjadi daya tarik negara-negara yang memerlukan dana pembangunan infrastuktur, terutama Kamboja.

Sejarah politik yang pahit menyebabkan pemerintahan kerajaan Kamboja tidak kondusif. Kekacauan politik yang terjadi di Kamboja menyebabkan Kamboja memiliki masalah serius dalam perkembangan ekonominya. Usaha kamboja dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi adalah menjalin hubungan bilateral dengan China.

3.2 Hubungan Bilateral China – Kamboja

Kamboja merupakan negara anggota ASEAN yang sangat bergantung pada bantuan luar negeri karena tingkat perekonomian yang rendah, namun mampu tumbuh sangat pesat dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan perekonomian Kamboja tidak lepas dari kerjasama bilateral, multilateral maupun privat (NGO) untuk melanjutkan proses pembangunan perekonomian negara tersebut.

Pertumbuhan perekonomian Kamboja meningkat dari tahun ke tahun Pada kurun waktu 5 tahun terakhir pendapatan *Gross Domestic Brutto* (GDP) mencapai

22,16 USD billion di tahun 2011 dan *Gross National Product* (GNP) mencapai 18.788,29 USD di tahun 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan pada perekonomian Kamboja. Sejak tahun 2011 pertumbuhan perekonomian Kamboja stabil pada angka 6,9 % (Trading Economics). Melihat angka pertumbuhan perekonomian negara Kamboja yang terus meningkat sejak kedua negara tersebut menjalin hubungan kerja sama dibidang ekonomi, pertumbuhan perekonomian Kamboja tumbuh sangat pesat dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan perekonomian Kamboja tidak lepas dari peran China.

3.2.1 Kerjasama di Bidang Ekonomi

China merupakan negara investor terbesar di Kamboja. Sampai pada tahun 2012 total Investasi China di Kamboja mencapai 8 milyar dolar lebih. Peran besar China tersebut diantaranya adalah pembangunan pabrik-pabrik industri di Phnom Penh yang menjadikan kawasan tersebut incaran para investor – investor asing untuk berinvestasi di Kamboja. China merupakan negara investor terbesar di Kamboja. Perusahaan-perusahaan China, sekitar 20% berinvestasi di sektor pertambangan seperti titanium, bauksit dan tembaga dimana hal tersebut dilakukan di wilayah Laut China Selatan. Sebagai imbal balik dari hubungan ke dua negara tersebut, perusahaan China mengimpor ratusan ribu ton beras dari Kamboja (Patnistik, 2012).

Tabel 3.2 Data Investor tertinggi di Kamboja (dalam juta USD)

Country	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (Jan– Sep)	1994–2011.9	
							Total	Rank
China	717	180	4,371	893	694	1,147	8,866	1
South Korea	1,010	148	1,238	120	1,026	134	4,027	2
Malaysia	28	241	3	7	167	231	2,609	3
UK	4	26	6	6	11	2,222	2,378	4
US	62	3	672	2	36	144	1,285	5
Taiwan	48	40	22	27	92	69	827	6
Vietnam	56	139	21	210	115	246	812	7
Thailand	100	108	74	178	2	0	746	8
Singapore	12	2	52	273	37	0	636	9
Russia	278	0	103	235	0	0	618	10
Total	4,440	2,656	10,889	5,859	2,691	5,674	39,886	-

Sumber : *Cambodia–China Relations: A Positive Sum Game?* (Pheakdey, 2012)

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sejak tahun 1994 kerjasama ekonomi bilateral antara China dan Kamboja terjalin, tercatat China sebagai negara peringkat pertama yang berinvestasi dengan jumlah besar di Kamboja mencapai total investasi 8,866 juta USD pada tahun 1994-2011. Kemudian diikuti negara-negara lainnya yaitu Korea Selatan 4,027 juta USD, Malaysia 2,609 juta USD. Investasi China di Kamboja pada tahun 2008 meningkat tajam dimana pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kamboja juga meningkat, dan pada tahun 2009 investasi China menurun. Namun pada tahun-tahun berikutnya ekonomi kamboja mampu bangkit seiring peningkatan investasi China yang terus meningkat. Aliran investasi asing yang masuk dipandang sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi dan liberalisasi ekonmi di Kamboja. Dengan demikian Kamboja sangat bergantung pada negara China yang menjadi negara peringkat pertama dan dianggap menjadi investor utama di Kamboja yang berinvestasi di negaranya dengan jumlah yang besar.

Selain itu, setelah didorong dengan sektor import bahan baku garmen, mesin, motor, mobil, bahan makanan, elektronik, furnitur obat-obatan dan kosmetik, kerjasama perdangan China dan Kamboja meningkat 3 kali lipat dari 791 juta USD pada tahun 2009 menjadi 2,5 milyar USD pada tahun 2011.

Thailand dan Amerika Serikat terus menjadi mitra dagang Kamboja dan disusul oleh China yang berada pada posisi kedua dibawah kedua negara tersebut (Pheakdey, 2012).

Tabel 3.3 Mitra ekspor-impor Kamboja tahun 2007-2010 (dalam juta USD)

Export Partners	2007	2008	2009	2010	Total 2007–2010
1. United States	2,363.1	1,970.9	1,552.8	2,183.6	8,070.4
2. Hong Kong, China	17.1	839.9	1,646.3	20.4	2,523.6
3. Canada	189.2	292.0	195.8	346.6	1,023.6
4. Germany	298.3	138.1	108.8	294.6	839.8
5. United Kingdom	211.7	155.7	179.7	315.0	862.2
6. Singapore	76.7	113.3	482.3	143.3	815.6
7. Vietnam	186.8	169.3	115.5	118.7	590.4
Import Partners					
1. Thailand	1,491.1	696.9	464.8	2,574.4	5,227.2
2. China	969.4	934.9	881.3	1,482.0	4,267.6
3. Singapore	482.2	303.8	209.0	2,436.1	3,431.0
4. Hong Kong, China	673.3	589.6	484.2	645.4	2,392.5
5. Vietnam	1,145.2	471.0	493.5	507.2	2,616.9
6. South Korea	309.6	229.4	209.1	214.9	962.9
7. Indonesia	134.0	96.2	145.5	239.5	615.3

Sumber : Cambodia–China Relations: A PositiveSum Game.? (Pheakdey, 2012)

Dari Tabel 3.3 total Ekspor Hong Kong, Kamboja ke China mencapai 2,523.6 juta USD tepat berada di bawah Amerika Serikat yang menempati peringkat pertama dengan total Ekspor 8,070.4 juta USD. Sedangkan Mitra Impor Kamboja, Thailand berada pada peringkat pertama dengan total impor tahun 2007-2010 mencapai 5,227.2 juta USD, dan China berada di posisi kedua dengan total mencapai 4,267.6 juta USD. China memang berada di posisi ke dua dalam mitra Ekspor-Import Kamboja pada tahun 2007-2010. China dan Kamboja telah berjanji untuk menggandakan jumlah perdagangan menjadi 5 miliar USD pada 2017 (Pheakdey, 2012). China berupaya menjadi mitra dagang Kamboja untuk mengalahkan dominasi AS. Sementara itu China diperkirakan akan melampaui kedua negara tersebut kurang lebih dalam dekade berikutnya terutama pada sektor Impor Kamboja dimana pada sektor Impor Kamboja akan mendatangkan keuntungan bagi China. Sedangkan pada sektor Ekspor Kamboja, China akan tetap mempertahankan kerjasamanya sebagai mitra dagang China dengan Kamboja. China dan Kamboja telah berjanji untuk melipat gandakan jumlah perdagangan menjadi 5 milyar USD pada tahun 2017 (Pheakdey, 2012).

3.2.2 Kerjasama di Bidang Militer

Selain Kerjasama di bidang ekonomi, Kerjasama militer China dan Kamboja telah dimulai dan diperketat sejak tahun 1990an. China bermurah hati memberikan bantuan Militer ke Kamboja dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh pada Desember 1999 China menyumbangkan bahan konstruksi senilai 1,5 juta USD, termasuk pembangunan barak baru, 10 Jeep, 10 Ambulan, dan parasutuntuk angkatan bersenjata Kamboja. Sedangkan pada tahun 2006, China menjanjikan bantuan pelatihan militer dan perbaikan peralatan militer serta memberikan 6 kapal patroli kepada Kamboja untuk membantu memerangi obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia (Pheakdey, 2012).

Bantuan pada sektor militer sangat diperlukan oleh Kamboja. Mengingat bahwa Kamboja merupakan negara yang lemah dalam kekuatan militer. Di Asia Tenggara, kekuatan militer Kamboja menduduki peringkat paling bawah sebelum Laos. *Angkaindex power* Kamboja masih terbilang 1,8404 diatas Laos yang memiliki *indeks power* sebesar 3,0608 (Global Fire Power). Semakin besar angka *indeks power* suatu negara menunjukkan bahwa kekuatan militer suatu negara semakin lemah. Sebaliknya, semakin kecil *angkaindex power* suatu negara menunjukkan kekuatan ketahanan militer yang semakin baik.

Antara tahun 2005 dan 2007 China menyumbangkan 9 kapal patroli dan 5 kapal perang untuk Kamboja. Dan telah berlabuh di pelabuhan Sihanoukville, 230 km di barat daya ibukota Phnom Penh, Kamboja. China berpendapat bahawa bantuan itu akan membantu Kamboja memperkuat keamanan laut untuk melawan bajak laut dan para penyelundup narkoba, dengan perbaikan dalam stabilitas sosial dan keamanan wilayah Kamboja. Bantuan itu pada dasarnya dapat dilihat sebagai upaya nyata untuk membangun benteng pertahanan militer untuk melawan ancaman sekarang dan masa depan yang mungkin timbul di wilayah itu (Sigfrido Burgos, 2010).

China menggunakan bantuan militer sebagai tanda dukungan politik terhadap Kamboja. Dimana pada bulan April 2010, Amerika Serikat membatalkan pengiriman 200 truk militer ke Kamboja sebagai bentuk protes terhadap Kamboja yang melakukan deportasi 20 pencari suaka Uighur. Namun

tidak kurang dari 3 minggu setelah itu, China menyumbangkan 257 truk militer untuk mengganti kerugian dari dibatalkannya bantuan militer Amerika Serikat ke Kamboja. Wakil Menteri Pertahanan Kamboja Moeung Samphan mengatakan: *“What Cambodia has requested, China has always provided us with whatever it could”* (Ciorciari, 2013).

Ungkapan Moeung Samphan diatas membuktikan bahwa China mengembangkan kerjasama dan membangun kepercayaan. Dengan bantuan itu China dapat meningkatkan pengaruhnya dan menurunkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Tea Banh dengan Menteri Pertahanan China Liang Guanglie pada Mei tahun 2012, China menegaskan kembali komitmen kerjasama militer dengan Kamboja. China menyediakan kemampuan militer serta bangunan senilai 17 juta USD untuk angkatan bersenjata Kamboja, termasuk pembangunan sekolah militer dan rumah sakit. Selain itu pada Mei tahun 2014 hubungan China dan Kamboja yang saling menguntungkan ditegaskan kembali ketika Tea Banh bertemu dengan Xu Qiliang Wakil Ketua Komisi Militer China. Pada pertemuan itu pengembangan kapasitas militer Kamboja diperluas dengan mencakup lebih dari 400 beasiswa untuk para perwira militer Kamboja melanjutkan studi di China (Lim, 2015). China juga memberikan pinjaman sebesar 195 juta USD (senilai Rp. 2,6 triliun) kepada Kamboja. Pinjaman tersebut digunakan Kamboja untuk menambah perlengkapan militernya. Pinjaman uang dari China tersebut digunakan Kamboja untuk membeli sejumlah peralatan militer. Kamboja memborong 12 helikopter Harbin Z-9 pada tahun 2014, kemudian China berderma lagi dengan memberi 26 truk militer dan 30 ribu seragam militer (Apriliana, 2015).

Sebagai negara yang lemah dalam hal kekuatan militer, Kamboja memerlukan dukungan modal untuk melakukan modernisasi kekuatan militernya. Kehadiran China untuk berkontribusi pada sektor keamanan-militer menjadi suatu hal yang penting bagi Kamboja. Pada sektor pertahanan, China memberikan pinjaman modal untuk perlengkapan militer Kamboja. Pemberian bantuan militer

dari China ke Kamboja digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Kamboja.



BAB 5. KESIMPULAN

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh China terhadap Kamboja dalam konflik Laut China Selatan. Secara historis hubungan bilateral kedua negara terjalin dengan baik bahkan China merupakan negara investor terbesar di Kamboja. Dalam Kajian ini, penulis menggunakan kerangka konsep Kepentingan Nasional dan *Regional Power Strategi* untuk menganalisa strategi China mempengaruhi Kamboja sebagai instrumen dalam konflik Laut China Selatan. Kajian ini menarik untuk dibahas karena Kamboja yang menjadi negara anggota ASEAN lebih mendukung China dalam konflik Laut China Selatan. Selain itu, dengan keterbatasan yang dimiliki Kamboja membuat China akan lebih mudah dalam mempengaruhi kebijakan Kamboja dan secara tidak langsung kebijakan Kamboja akan mengikuti arahan dari China khususnya dalam isu sengketa Laut China Selatan.

Konflik sengketa kawasan Laut China Selatan yang melibatkan China dengan 4 negara anggota ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Sengketa ini terkait kedaulatan atas wilayah pulau Paracel dan Spratly. Karena banyaknya potensi yang ada di kedua kepulauan itu, membuat perairan Laut China Selatan sangat penting bagi negara-negara kawasan bahkan negara-negara besar yang mempunyai kepentingan-kepentingan di perairan Laut China Selatan. Tumpang tindih klaim kepemilikan dari pihak bersengketa semakin rumit. Perselisihan ini memicu kekhawatiran menjadi kawasan sengketa yang berdampak global. ASEAN sebagai organisasi Internasional yang berbasis di Asia Tenggara dibutuhkan untuk dapat menengahi konflik di kawasan Laut China Selatan. ASEAN gagal mengeluarkan keputusan bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah karena perbedaan pendapat dalam membahas penyelesaian konflik sengketa Laut China Selatan. KTT ASEAN yang telah diselenggarakan 2 kali belum menghasilkan solusi apapun terkait konflik Laut China Selatan karena Kamboja tidak sepatutnya dan menolak untuk bersikap terkait aksi China di Laut

China Selatan. Dalam konflik Laut China Selatan, Kamboja memang tidak terlibat langsung. Namun kehadiran Kamboja di dalam ASEAN dapat mempengaruhi

kebijakan dan upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik sengketa Laut China Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah China telah menawarkan beberapa keuntungan kepada pemerintahan Kamboja seperti memberikan manfaat ekonomi dan militer yang luas tanpa menuntut bentuk-bentuk imbalan politik yang mahal sebagai gantinya, dengan demikian Kamboja terikat pada kebijakan China. Bantuan China kepada Kamboja di sektor ekonomi berupa pemberian hutang bahkan menjadi investor terbesar di Kamboja. Sedangkan di sektor militer, China memberikan bantuan militer dengan modernisasi militer Kamboja. Secara ekonomi, China memanfaatkan situasi dimana Kamboja sangat membutuhkan bantuan ekonomi dan mendapatkan keuntungan dari Kamboja. China memberikan bantuan ekonomi dan pertahanan politik yang dapat diandalkan terhadap kedaulatan Kamboja, dan sebagai imbalannya Kamboja menyediakan akses ke sumber daya dan mendukung pada isu-isu yang menjadi perhatian utama China yaitu isu Laut China Selatan. Pada sektor militer, pemberian bantuan militer dari China ke Kamboja digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Kamboja. Selain itu China memiliki kepentingan untuk meningkatkan keamanan regional melalui Kamboja. Mengingat bahwa Kamboja merupakan negara yang lemah dalam kekuatan militer. Kehadiran China untuk berkontribusi pada sektor keamanan-militer menjadi suatu hal yang penting bagi Kamboja.

China membutuhkan dukungan Kamboja di dalam ASEAN dalam mewujudkan kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan dalam mendominasi kekuatannya dalam konflik Laut China Selatan. China menggunakan Kamboja sebagai *proxy* di tubuh ASEAN dalam konflik Laut China Selatan. China berhasil mempengaruhi Kamboja untuk mengikuti arahnya dan mendukung China di dalam ASEAN. Melalui Kamboja lah China mampu merusak tatanan keamanan di ASEAN terutama pada KTT yang membahas isu konflik Laut China Selatan. Sehingga ASEAN berada pada posisi sulit dalam

menyelesaikan konflik Laut China Selatan agar konflik tersebut tidak menjadi konflik terbuka dimasa depan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Asnani Usman, R. S. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi Asean*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

DepartemenLuarNegeri. (1975). *White Paper on the Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) Islands*. Saigon: Republic of Vietnam.

Gie, T. L. (1984). *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Heinzig, D. (1976). *Disputed Islands In The South China Sea*. Hamburg: Institute of Asian Affairs.

Khemakorn, P. (2006). *Sustainable Management of Pelagic Fisheries in*. New York: United Nations – The Nippon Foundation Fellow.

Kurnia, L. M. (2017). *BETWEEN THREATS AND OPPORTUNITIES: Diantara Ancaman dan Peluang*. Jakarta: Epicentrum Walk 7th Floor B-717.

Lemke, D. (2002). *Regions of War and Peace*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Mahbubani, K., & Sng, J. (2017). *ASEAN Miracle A Catalyst for Peace*. Dalam S. Gretiani, Keajaiban ASEAN penggerak perdamaian (hal. 361). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI.

Mubyarto. (1999). *KEMISKINAN DI VIETNAM, LAOS, DAN KAMBOJA*. Jakarta: Kantor Menko Ekuin.

Ron Hammond, d. (2009). *Chapter 06-Socialization*. Retrieved from Freesociologybooks: http://freesociologybooks.com/Introduction_To_Sociology/06_Socialization.php

Yin, R. K. (2013). *Case Study Research : Design and Methods*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc.

Jurnal:

Akmal, P. (2016). Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 2009-2014. *Journal of International Society*, Vol. 3, 1.

Harahap, A. B. (2016). Upaya ASEAN dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015 . *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1-15.

Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *British Journal of International Studies* Vol.2 no 3.

Pheakdey, H. (2012). Cambodia–China Relations: A PositiveSum Game? *Journal of Current Southeast Asian Affairs* , 60.

Dokumen, Artikel, Report dan Paper :

Beukel, E. (2010). China and the South China Sea: Two Faces of Power in the Rising China's Neighborhood Policy . *Danish Institute for International Studies, DIIS Working Papers*, 1-21.

Ciorciari, J. D. (2013). *CHINA AND CAMBODIA: PATRON AND CLIENT?* Michigan: Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan.

Country Study for Cambodia's Officially Study for Japan's Development . (2002). *The Kingdom of Cambodia From Reconstruction to Sustainable Development*. Tokyo: Japan International Cooperation Agency.

Destradi, S. (2008). *Empire, Hegemony, and Leadership: Developing a Research Framework for the Study of Regional Powers*. Hamburg: German Institute of Global and Area Studies.

Flemes, D. (2007). Conceptualising Regional Power in International Relations. *Lessons from the South African Case*, 13-14.

Kurlantzick, J. (2007). Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World. *The Tools of Culture*, pp. 62-81.

Nguyen, H. T. (2012). Vietnam's Position on the Sovereignty over the Paracels & the Spratlys: Its Maritime Claims. *REGIONAL FOCUS & CONTROVERSIES*, 165-211.

Sigfrido Burgos, S. E. (2010). China's Strategic Interests in Cambodia: Influence and Resources. *ASIAN SURVEY*, 615-639.

Internet atau website:

Agregasi. (2015, September 7). *Transformasi Ekonomi China dalam Grafik*. Retrieved september 3, 2018, from okezone.com: <https://economy.okezone.com/read/2015/09/07/213/1209500/transformasi-ekonomi-china-dalam-grafik>

Amin, A. J. (2012, May 29). *Latar Belakang Konflik Di Kepulauan Spratly*. Retrieved 6 September, 2018, from scribd.com: <https://www.scribd.com/document/95149151/Latar-Belakang-Konflik-Di-Kepulauan-Spratly>

Apriliana, M. (2015, November 7). *China Sumbang Misil Antipesawat untuk Kamboja*. Retrieved Oktober 5, 2017, from www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151106190758-106-90007/china-sumbang-misil-antipesawat-untuk-kamboja/>

ASEAN. (n.d.). *About ASEAN*. Retrieved Oktober 17, 2017, from www.asean.org: <http://asean.org/asean/about-asean/>

Bachdar, S. (2017, September 8). *ASEAN Butuh China atau China Butuh ASEAN?* Retrieved Januari 9, 2019, from <http://marketeters.com>: <http://marketeters.com/asean-butuh-china-atau-china-butuh-asean/>

- BBC. (2015, December 28). *South China Sea: Filipino protesters land on disputed island*. Retrieved September 8, 2018, from www.bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-asia-35188011
- brookings. (1999, September 1). *China's Changing Oil Strategy and its Foreign Policy Implications*. Retrieved November 28, 2018, from www.brookings.edu: https://www.brookings.edu/articles/chinas-changing-oil-strategy-and-its-foreign-policy-implications/
- CEIC. (n.d.). *Kamboja*. Retrieved Februari 03, 2019, from www.ceicdata.com: https://www.ceicdata.com/id/country/cambodia
- Detik. (2016, Juli 12). *Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan*. Retrieved September 9, 2018, from [detikNews: https://news.detik.com/internasional/3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan](https://news.detik.com/internasional/3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan)
- Fadlan, M. (2014). *Sejarah Negara Kamboja*. Dipetik Oktober 19, 2018, dari www.academia.edu: https://www.academia.edu/12544652/Sejarah_Negara_Kamboja
- Global Fire Power. (2006-2018). *2018 Military Strength Ranking*. Retrieved agustus 3, 2018, from [globalfirepower.com: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp](http://www.globalfirepower.com: globalfirepower.com: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp)
- Global Fire Power. (2018). *2017 Cambodia Military Strength*. Retrieved maret 15, 2018, from [globalfirepower.com: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=cambodia](http://www.globalfirepower.com: globalfirepower.com: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=cambodia)
- Hardoko, E. (2015, April 17). *China Bangun Pangkalan Udara di Wilayah Sengketa Laut China Selatan*. Retrieved November 29, 2018, from [internasional.kompas.com: https://internasional.kompas.com/read/2015/04/17/16515421/China.Bangun.Pangkalan.Udara.di.Wilayah.Sengketa.Laut.China.Selatan](http://internasional.kompas.com: internasional.kompas.com: https://internasional.kompas.com/read/2015/04/17/16515421/China.Bangun.Pangkalan.Udara.di.Wilayah.Sengketa.Laut.China.Selatan)
- Harian Analisa. (2016, Januari 13). *Parlemen Kamboja Sahkan Perjanjian AIB*. Dipetik Oktober 26, 2018, dari [harian.analisadaily.com: http://harian.analisadaily.com/ekonomi-internasional/news/parlemen-kamboja-sahkan-perjanjian-aiib/205109/2016/01/13](http://harian.analisadaily.com: harian.analisadaily.com: http://harian.analisadaily.com/ekonomi-internasional/news/parlemen-kamboja-sahkan-perjanjian-aiib/205109/2016/01/13)

- Ian Storey, L. P. (2009). *Cambodia*. Dipetik Oktober 26, 2018, dari calhoun.nps.edu:
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/38316/inc_ear_ro0910.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- JPNN. (2012, Agustus 10). *Bela China, Kamboja Tarik Dubes di Filipina*. Retrieved April 18, 2017, from www.jpnn.com:
<https://www.jpnn.com/news/bela-china-kamboja-tarik-dubes-di-filipina>
- Judiono, J. (2003, Januari 17). *Mencermati Sengketa Teritorial Laut China Selatan (Kasus Kepulauan Spratly dan Paracel)*. Retrieved September 7, 2018, from [rudyc.com](http://www.rudyc.com): http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/05123/j_judiono.htm
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, Juli 13). *Ulang Tahun Emas ASEAN: Gelorakan Semangat Sentralitas dan Kesatuan ASEAN*. Retrieved Oktober 23, 2017, from www.kemlu.go.id:
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, Juli 13). *Ulang Tahun Emas ASEAN: Gelorakan Semangat Sentralitas dan Kesatuan ASEAN*. Retrieved Oktober 23, 2017, from www.kemlu.go.id:
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Ulang-Tahun-Emas-ASEAN-Gelorakan-Semangat-Sentralitas-dan-Kesatuan-ASEAN-.aspx>
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2013, Februari 28). *Laut China Selatan*. Retrieved April 11, 2017, from www.kemlu.go.id:
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx>
- Kementerian Luar Negeri. (2008, April 4). *Menangkap peluang pasar Kamboja*. Dipetik oktober 19, 2018, dari www.kemlu.go.id:
<https://www.kemlu.go.id/phnompenh/en/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Menangkap-peluang-pasar-Kamboja.aspx>
- Kingdom of Cambodia. (n.d.). *Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation*. Retrieved Agustus 13, 2018, from <https://www.mfaic.gov.kh/cambodia-asean/cambodias-membership>:
<https://www.mfaic.gov.kh/cambodia-asean/cambodias-membership>

- Lim, A. C.-H. (2015, juni 30). *Sino-Cambodian Relations: Recent Economic And Military Cooperation – Analysis*. Dipetik Oktober 27, 2018, dari www.eurasiareview.com: <https://www.eurasiareview.com/30062015-sino-cambodian-relations-recent-economic-and-military-cooperation-analysis/>
- Media Indonesia. (2016, Juli 25). *ASEAN tidak Satu Suara soal Laut China Selatan*. Retrieved April 21, 2017, from www.mediaindonesia.com: <http://mediaindonesia.com/news/read/57969/asean-tidak-satu-suara-soal-laut-china-selatan/2016-07-25>
- Noroyono dan Hapsari, B. N. (2012, Juli 14). *Sengketa Laut Cina Selatan, ASEAN Terpecah*. Retrieved April 17, 2017, from <http://www.republika.co.id>: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/14/m74fnv-sengketa-laut-cina-selatan-asean-terpecah>
- Offshore Energy Today. (2016, Januari 20). *Vietnam claims China's rig drilling in disputed waters. China denies wrongdoing*. Retrieved September 8, 2018, from www.offshoreenergytoday.com: <https://www.offshoreenergytoday.com/vietnam-claims-chinas-rig-drilling-in-disputed-waters-china-denies-wrongdoing/>
- Pangestu, A. M. (t.thn.). *Pengaruh China Terhadap Perekonomian Kamboja*. Dipetik oktober 2, 2018, dari [academia](http://www.academia.edu): https://www.academia.edu/9869432/Pengaruh_China_Terhadap_Perekonomian_Kamboja
- Patnistik, E. (2012, Februari 16). *Berkat China, Ekonomi Kamboja Mulai Bangkit*. Dipetik oktober 20, 2018, dari www.kompas.com: <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/16/0929515/Berkat.China.Ekonomi.Kamboja.Mulai.Bangkit>
- PERMANA, S. K. (2015). *PERKEMBANGAN DEMOKRASI KAMBOJA*. Dipetik Oktober 26, 2018, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/phnompenh/Buku/pro%20website%20Fungsi%20Politik.docx>
- Phillips, T. (2018, Februari 6). *Photos show Beijing's militarisation of South China Sea in new detail*. Retrieved November 29, 2018, from www.theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2018/feb/06/photos-beijings-militarisation-south-china-sea-philippines>

- Ramadhan, B. (2015, Mei 7). *Kamboja: ASEAN Jangan Terlibat dalam Sengketa Laut Cina Selatan*. Retrieved April 17, 2017, from <http://www.republika.co.id:http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/05/07/nnz9j4-kamboja-asean-jangan-terlibat-dalam-sengketa-laut-cina-selatan>
- REUTERS. (2015, November 6). *China supplies Cambodia with anti-aircraft hardware in new military aid*. Dipetik Oktober 2018, 27, dari www.reuters.com:https://www.reuters.com/article/us-cambodia-china/china-supplies-cambodia-with-anti-aircraft-hardware-in-new-military-aid-idUSKCN0SV12R20151106
- Reyta, F. (2016, April 28). *Pertumbuhan Pesat Ekonomi Kamboja*. Dipetik oktober 20, 2018, dari [www.strategidanbisnis.com:http://strategidanbisnis.com/artikel/1089/pertumbuhan-pesat-ek](http://strategidanbisnis.com:www.strategidanbisnis.com:http://strategidanbisnis.com/artikel/1089/pertumbuhan-pesat-ek)
- Saju, P. S. (2016, Maret 8). *China Mengontrol Laut China Selatan untuk Pelayaran Aman dan Bebas*. Retrieved April 8, 2017, from [www.kompas.com:http://internasional.kompas.com/read/2016/03/08/13404881/China.Mengontrol.Laut.China.Selatan.untuk.Pelayaran.Aman.dan.Bebas](http://internasional.kompas.com:www.kompas.com:http://internasional.kompas.com/read/2016/03/08/13404881/China.Mengontrol.Laut.China.Selatan.untuk.Pelayaran.Aman.dan.Bebas)
- Saju, P. S. (2017, April 26). *Kehadiran China di ASEAN, Berkah atau Masalah? .* Retrieved Januari 9, 2019, from [Kompas.com:https://internasional.kompas.com/read/2017/04/26/05000021/kehadiran.china.di.asean.berkah.atau.masalah](https://internasional.kompas.com:Kompas.com:https://internasional.kompas.com/read/2017/04/26/05000021/kehadiran.china.di.asean.berkah.atau.masalah)
- Salengke, H. H. (2016, Juli 26). *ASEAN kembali Melempem*. Retrieved April 20, 2017, from [www.mediaindonesia.com:http://mediaindonesia.com/news/read/58194/asean-kembali-melempem/2016-07-26#](http://mediaindonesia.com:www.mediaindonesia.com:http://mediaindonesia.com/news/read/58194/asean-kembali-melempem/2016-07-26#)
- Suastha, R. D. (2017, April 21). *RI-AS Sepakati Solusi Damai Sengketa Laut China Selatan*. Retrieved Oktober 5, 2017, from www.cnnindonesia.com:internasional/20170421190132-106-209339/ri-as-sepakati-solusi-damai-sengketa-laut-china-selatan/
- Trading Economics. (tanpa tahun). *Cambodia GDP*. Dari [tradingeconomics.com:https://tradingeconomics.com/cambodia/gdp](https://tradingeconomics.com/cambodia/gdp) Diakses pada 17 oktober 2018.

- U.S. Energy Information Administration. (2013, April 4). *The South China Sea is an important world energy trade route*. Retrieved April 8, 2017, from www.eia.gov: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10671#>
- Utama, L. (2016, Maret 18). *18-03-1969: AU AS Hujani Kamboja dengan Bom*. Dipetik oktober 17, 2018, dari www.viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/749073-18-03-1969-au-as-hujani-kamboja-dengan-bom>
- Vinanda, R. A. (2017, Februari 08). *Dukung Prinsip 'Satu China', Kamboja Larang Pengibaran Bendera Taiwan*. Retrieved Desember 28, 2018, from news.okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2017/02/07/18/1612162/dukung-prinsip-satu-china-kamboja-larang-pengibaran-bendera-taiwan>
- VOA. (2013, Agustus 22). *Kamboja desak hubungan ASEAN-China yang lebih erat*. Retrieved September 2, 2018, from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/kamboja-desak-hubungan-asean-china-yang-lebih-erat/1735285.html>
- Weissmann, M. (2014, Maret 15). *Diplomasi 'Soft Power' Cina dan Kebijakan 'Constructive Engagement' ASEAN: Hubungan Sino-ASEAN dan Laut Cina Selatan*. Retrieved April 11, 2017, from www.kyotoreview.org: <https://kyotoreview.org/issue-15/diplomasi-soft-power-cina-dan-kebijakan-constructive-engagement-asean-hubungan-sino-asean-dan-laut-cina-selatan/>
- Zaneta, A. (2015, Juni 26). *Kamboja dalam Penguasaan Pol Pot*. Dipetik oktober 19, 2018, dari kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/ameliazaneta/55005cd38133112019fa7545/kamboja-dalam-penguasaan-pol-pot>